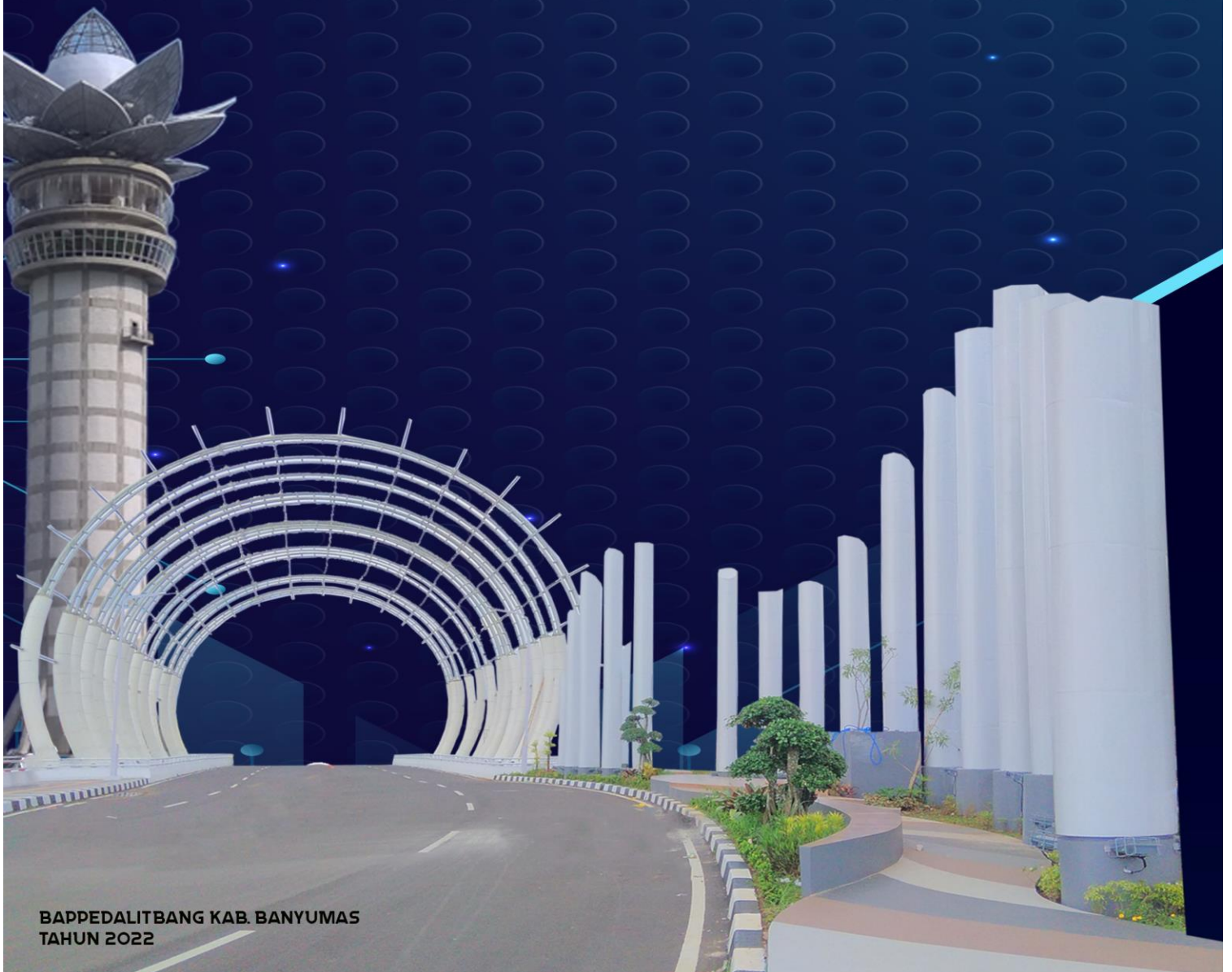




PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

**RENCANA TINDAK
PENGENDALIAN (RTP) STRATEGIS
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2022**



BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1 PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. SPIP diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu :

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. Keandalan laporan keuangan;
3. Pengamanan aset negara;
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

1.2 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Tindak Pengendalian yang digunakan sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Tujuan pembangunan daerah yang menjadi ampunan Pemerintah Kabupaten Banyumas seperti yang tertuang yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik

pariwisata dan ekonomi kreatif dengan pemanfaatan IPTEK. Rencana Tindak Pengendalian ini diprioritaskan untuk pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RTP pada Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.

1.4 TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk memberikan acuan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah penyimpangan dan mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.5 MANFAAT

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 2) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas ;

1.6 RUANG LINGKUP

Rencana Tindak Pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas sasaran dan strategi Pemerintah Kabupaten Banyumas. Sasaran dan strategi Pemerintah Kabupaten Banyumas tercantum dalam Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 antara lain:

Sasaran	Strategi
Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah • Optimalisasi pencapaian reformasi birokrasi dalam Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Akuntabilitas, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik • Melakukan penataan ASN sesuai dengan kompetensi Meningkatkan kapasitas ASN dan melakukan penataan ASN sesuai kompetensi • Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan dengan menyediakan SDM terlatih dan sarana prasarana kearsipan yang memadai agar mendorong pengelolaan arsip secara baku, tertib perizinan penggunaan arsip serta perlindungan dan penyelamatan arsip • Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan sesuai rencana induk dengan meningkatkan implementasi kajian strategis dan inovasi daerah • Meningkatkan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD • Meningkatkan Pengelolaan PAD • Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah (TPB 16) • Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan mengoptimalkan kapabilitas APIP dan mendorong OPD menerapkan SPIP
Meningkatnya birokrasi yang kapabel	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pengelolaan e-Government dengan meningkatkan pengelolaan data statistik sektoral, layanan informasi publik serta keamanan data dan sistem informasi (TPB 16)
Meningkatnya pelayanan publik yang prima	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pelayanan perijinan, serta penyebaran informasi potensi dan peluang investasi • Meningkatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil (TPB 1) • Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan jangkauan pelayanan publik untuk mendukung kesiapan pemekaran wilayah (TPB 16) • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat serta penataan desa
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses pendidikan (TPB 4) • Meningkatkan kualitas pendidikan (TPB4) • Meningkatkan promosi minat baca dan peningkatan layanan perpustakaan dengan pemenuhan standar nasional
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunkan angka kematian dan kesakitan dengan meningkatkan status gizi masyarakat dan perbaikan kualitas faskes (TPB 3) • Meningkatkan Ratio Dokter melalui perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM yang baik serta mengembangkan mutu dan kompetensi SDM serta pemberian ijin praktek tenaga kesehatan (TPB 3) • Memenuhi sediaan farmasi dan alat kesehatan serta terawasnya kualitas makanan dan minuman • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan untuk meningkatkan rasio desa siaga aktif mandiri dan posyandu mandiri

Sasaran	Strategi
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, perlindungan perempuan serta kualitas keluarga (TPB 5) Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak (TPB 5)
Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan kualitas pelayanan dan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana (TPB 3)
Meningkatnya perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman layak huni dengan Pencegahan timbulnya perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu (TPB 11) Pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan serta rehabilitasi sosial (TPB 1) Meningkatkan penanganan korban bencana dengan penyediaan logistik dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pencegahan, penanganan bencana, dan pemulihan pasca bencana (TPB 11)
Menurunnya ketimpangan pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan dan perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan produktivitas industri kecil sehingga mampu memiliki daya saing baik harga maupun kualitas produk Mengembangkan usaha perdagangan dengan meningkatkan kelayakan pasar tradisional dan meningkatkan kerjasama perdagangan
Meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agribisnis untuk ketersediaan pangan utama	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan Kedaulatan Pangan dengan meningkatkan sumber daya ekonomi, diversifikasi dan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan (TPB 2) Meningkatkan kualitas SDM dan sarpras pendukung produksi pertanian dan peternakan Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengawasan perikanan serta nilai tambah olahan hasil perikanan (TPB 14) Mengembangkan usaha agribisnis hasil pertanian, peternakan dan perikanan agar memiliki nilai tambah ekonomi dengan mengoptimalkan diversifikasi usaha, meningkatkan produksi dan olahan hasil, akses petani terhadap teknologi, modal, dan pasar
Meningkatnya investasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan minat investasi melalui promosi, pengendalian pelaksanaan, dan pengembangan iklim investasi dengan pemenuhan infrastruktur penunjang investasi dan mendorong pengembangan kawasan peruntukan industri
Meningkatnya kesempatan berusaha	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK), dan menjalin kemitraan dengan Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) (TPB 10)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (TPB 12) Meningkatkan penanganan sampah perkotaan dan pedesaan terpadu (TPB 11)
Meningkatnya penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dengan penumbuhan desa tangguh bencana (TPB 13) Mengurangi resiko bencana (TPB 13)
Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan penyediaan rencana tata ruang berupa RDTR dan RTBL serta mengintensifkan pengendalian dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana peruntukannya Penertiban lahan yang belum bersertifikat antisipasi alih fungsi lahan (TPB 15)
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dan memadai	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan sesuai fungsi jalan, meningkatkan kualitas jalan, jembatan dan irigasi serta bangunan pelengkap jalan dan jembatan (TPB 9) Meningkatkan penyediaan infrastruktur air minum aman dan berkelanjutan (TPB 1) Meningkatkan kualitas serta penataan kawasan dan bangunan pemerintah

Sasaran	Strategi
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penyediaan infrastruktur sanitasi (TPB 1) • Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman (TPB 11) • Meningkatkan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan
Meningkatnya Industri Pariwisata yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan daya tarik wisata dengan mendorong pemasaran serta pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif (TPB 8)
Meningkatnya pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dan pemanfaatan serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektualnya • Memantapkan kelembagaan koperasi meningkatkan pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan dan perlindungan serta pengawasan Koperasi • Meningkatkan kualitas Usaha kerakyatan dengan pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro (TPB 8)
Meningkatnya kerukunan dan peran masyarakat dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat, serta memantapkan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara (TPB 16) • Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan politik masyarakat • Peningkatan kualitas fasilitasi pelayanan keagamaan dengan memakmurkan Pesantren, Masjid serta tempat-tempat ibadah lainnya serta meningkatkan peran forum komunikasi, dialog, dan diskusi antar umat beragam • Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan penegakan Perda/ Perbup dan mengoptimalkan pelayanan keamanan masyarakat
Meningkatnya peran dan daya saing pemuda	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan daya saing keolahragaan, kepramukaan dan kepemudaan
Meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pelestarian budaya dengan fasilitasi, pelestarian dan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya

Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian melibatkan seluruh jajaran baik pimpinan maupun pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1 PENGERTIAN SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2 TUJUAN SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3 UNSUR-UNSUR SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut, yaitu :

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian dengan :

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) Komitmen terhadap kompetensi;
- 3) Kepemimpinan yang kondusif;

- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian Resiko

Penilaian resiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian resiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko organisasi serta analisis resiko untuk menentukan pengaruh resiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi resiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi resiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian resiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian *existing*.

Kegiatan untuk mengendalikan resiko dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa resiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa resiko.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan

waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan penilaian resiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi. Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit.

2.4 PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri / Pimpinan Lembaga/ Gubernur / Bupati / Walikota/ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, maka dipandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1 LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2 KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Kondisi lingkungan pengendalian Pemerintah Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Kurang Memadai
2	Komitmen terhadap kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Kurang Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Kurang Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Kurang Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Kurang Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Kurang Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi	Kurang Memadai

Dari 8 (delapan) sub unsur pada lingkungan pengendalian menunjukkan bahwa 7 (tujuh sub unsur) memadai dan 1 (satu) sub unsur kurang memadai yaitu Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM. Pada sub unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM mempunyai kelemahan:

- a. Terdapat pegawai yang belum memenuhi ketentuan jam kerja
- b. Laporan bulanan kepegawaian belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
- c. Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala belum sesuai ketentuan

REKAPITULASI HASIL KUISIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

PEMDA : PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN : 2022

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)																												KESIMPULAN KUISISIONER CEE						
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28		R29	Modus				
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																																			Memadai
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	Memadai		
2	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	Memadai	
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	Memadai		
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	1	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	Memadai		
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																																		Memadai	
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	Memadai			
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	Memadai			

No	Pertanyaan/ Kuisiонер	JAWABAN KORESPONDED (R)																												KESIMPULAN KUISIОНER CEE		
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28		R29	Modulus
3	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	Memadai	
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	Memadai
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																														Kurang Memadai	
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	Memadai	
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	Memadai	
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	Memadai	
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	Memadai	
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	Memadai	
6	Rencana/sasaran strategis Pemda telah dijabarkan kedalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	Memadai	
7	Rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko	4	4	2	2	3	4	2	2	3	4	2	2	2	4	2	4	2	2	3	2	2	4	4	3	2	2	2	2	2	Kurang Memadai	

No	Pertanyaan/ Kuisiонер	JAWABAN KORESPONDED (R)																												KESIMPULAN KUISIONER CEE		
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28		R29	Modus
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	Memadai
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN																														Kurang Memadai	
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	Memadai	
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	4	4	3	2	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	4	1	1	4	4	2	1	2	4	3	3	1	3	3	4	3	1	3	1	3	4	4	3	3	1	1	2	1	2	Kurang Memadai
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT																														Memadai	
1	Kriteria penndelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	Memadai
3	Kewenangan direviu secara periodik	4	4	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA																														Kurang Memadai	

No	Pertanyaan/ Kuisiонер	JAWABAN KORESPONDED (R)																												KESIMPULAN KUISIONER CEE		
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28		R29	Modulus
1	OPD telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	4	4	2	3	3	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	4	3	2	2	2	2	3	4	3	2	2	3	3	3	2	Kurang Memadai
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	4	4	2	3	3	3	1	1	2	1	2	2	1	3	3	4	3	1	1	1	1	4	4	3	1	1	1	1	1	2	Kurang Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	Memadai
7	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	2	2	3	3	2	4	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
G	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF																															Memadai
1	Inspektorat Daerah melakukan reuiu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reuiu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	Memadai

No	Pertanyaan/ Kuisiонер	JAWABAN KORESPONDED (R)																													KESIMPULAN KUISIОНER CEE	
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29		Modus
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	Memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																														Memadai	
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	Memadai	
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	Memadai	

DATA KORESPONDEN

- R1. DINDIK
- R2. DINKES
- R3. RSUD BANYUMAS
- R4. RSUD AJIBARANG
- R5. DPU
- R6. DINPERKIM
- R7. BPBD

- R8. KESBANGPOL
- R9. SATPOL PP
- R10. DINSOSPERMASDES
- R11. DINAKERKOP UKM
- R12. DLH
- R13. DINDUKCAPIL
- R14. DPPKBP3A

- R15. DINHUB
- R16. DINKOMINFO
- R17. DPMPTSP
- R18. DINPORABUDPAR
- R19. DINARPUSDA
- R20. DINKANNAK
- R21. DINPERTAN KP

- R22. DINPERINDAG
- R23. SETDA
- R24. SETWAN
- R25. INSPEKTORAT
- R26. BAPPEDA LITBANG
- R27. BAPENDA
- R28. BKAD
- R29. BKPSDM

**CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Kabupaten Banyumas**

PEMDA : **PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**
TAHUN : **2022**

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 2020 (Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan) Nomor 66/LHP/XVIII.SMG/05/2021 Tanggal 20 Mei 2021	Pelaksanaan Belanja Hibah tidak sesuai dengan ketentuan diantaranya kegiatan evaluasi dan monitoring penggunaan Hibah Uang belum dilaksanakan serta Hibah Uang kepada KONI direalisasikan tidak sesuai dengan NPHD sehingga tidak dapat diketahui ketepatan penggunaannya.	Terdapat Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas.	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT
2	Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 2020 (Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan) Nomor 66/LHP/XVIII.SMG/05/2021 Tanggal 20 Mei 2021	Kelemahan pengelolaan Dana Bergulir pada Pemkab Banyumas yaitu di antaranya pengelolaan saldo Kas Pokok dan Bunga atas Pokok Dana Bergulir yang terakumulasi pada rekening di PT BPR BKK Purwokerto tidak sesuai ketentuan, Dana Pinjaman Bergulir pada Bank Jateng sudah tidak dikelola dan saldonya tidak dapat diakses oleh Pemkab Banyumas, serta fungsi penagihan Dana Pinjaman Bergulir tidak optimal.	1. Terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas 2. Terdapat Peraturan Bupati Banyumas nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas.	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
3	Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 2020 (Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan) Nomor 66/LHP/XVIII.SMG/05/2021 Tanggal 20 Mei 2021	Pengelolaan Barang Milik Daerah belum memadai yaitu diantaranya kondisi barang/aset pada KIB tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, kelemahan dalam kapitalisasi Aset Tetap, aset eks perjanjian kemitraan Bangun Guna Serah serta Aset PSU belum dinilai dan dicatat sesuai ketentuan, dan Pemkab Banyumas belum menyesuaikan regulasi sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi sesuai Permendagri Nomor 108 Tahun 2016.	1. Terdapat sistem informasi pengelolaan barang milik daerah. 2. Terdapat peraturan bupati tentang pengelolaan barang milik daerah	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
4	Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2019 (Sistem Pengendalian Intern) Nomor 99 B/LHP/XVIII.SMG/05/2020 tanggal 15 Mei 2020	Penatausahaan dan Pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Banyumas belum tertib antara lain informasi identitas aset tetap dalam Kartu Inventaris Barang belum sepenuhnya dicatat secara tepat dan lengkap, aset tetap berupa tanah jalan lingkungan belum seluruhnya tercatat, serta pengamanan barang milik daerah belum tertib.	1. Terdapat sistem informasi pengelolaan barang milik daerah. 2. Terdapat peraturan bupati tentang pengelolaan barang milik daerah	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
5	Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2019 (Sistem Pengendalian Intern) Nomor 99 B/LHP/XVIII.SMG/05/2020 tanggal 15 Mei 2020	Pengelolaan bantuan keuangan desa pada Kabupaten Banyumas tidak memadai antara lain penganggaran tidak melalui e-planning.	Terdapat sistem informasi e-planning	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT
6	Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2019 (Sistem Pengendalian Intern) Nomor 99 B/LHP/XVIII.SMG/05/2020 tanggal 15 Mei 2020	Pertanggungjawaban hibah barang pada Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman tidak didukung dokumen yang memadai yaitu berupa NPHD dan BAST sebesar Rp. 14.269.067.000,00.	Terdapat Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas.	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
7	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Nomor B/453/AA. 05/2021 tanggal 21 Maret 2021	Peta proses bisnis belum sepenuhnya menggambarkan proses pencapaian kinerja pada setiap OPD, dan menjadi acuan dalam perumusan cascading kinerja utama pada setiap OPD sampai level individu, untuk memastikan bahwa setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas dalam pencapaian kinerja di masing-masing OPD	Perbup 36 th 2021 ttg perubahan perbup no 26 th 2020 ttg peta proses bisnis pemkab banyumas	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
8	Laporan Pelaksanaan Reviu atas Hasil Penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemkab Banyumas Tahun 2019, BPKP Perwakilan Jateng No. RR-1083/PW11/3.2/2019 tanggal 23 Desember 2019	Belum optimalnya pembinaan dan fasilitasi terhadap Tim Counterpart untuk melakukan perbaikan secara mandiri (self improvement) atas kondisi permasalahan yang ada untuk peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP	Terdapat SK Tim Counterpart	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF
9	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Nomor B/453/AA. 05/2021 tanggal 21 Maret 2021	Sistem pengendalian internal dengan mengidentifikasi risiko kemungkinan kegagalan pencapaian target kinerja belum sepenuhnya diimplementasikan di seluruh OPD	Telah disusunnya RTP 2021 Tingkat OPD dan dilakukan Review RTP 2021 Tingkat OPD (OPD Sampel penilaian Baseline Maturitas SPIP)	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
10	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Nomor B/453/AA. 05/2021 tanggal 21 Maret 2021	Sistem pengendalian internal dengan mengidentifikasi risiko kemungkinan kegagalan pencapaian target kinerja belum sepenuhnya diimplementasikan di seluruh OPD	Tersusunnya Perbup 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Risiko di Lingkungan pemkab Banyumas	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
11	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Nomor B/453/AA. 05/2021 tanggal 21 Maret 2021	Kualitas evaluasi program masih perlu ditingkatkan dengan melakukan analisis yang didasarkan pada capaian hasil program serta keterpaduan lintas OPD untuk mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran	Terdapat aplikasi eMonev dengan tambahan menu permasalahan dan rekomendasi sebagai hasil analisis terhadap capaian program	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT
12	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Nomor B/453/AA. 05/2021 tanggal 21 Maret 2021	Reviu dan refocusing terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran belum mengacu pada penyempurnaan IKU dan memastikan bahwa anggaran dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis.	Telah dilakukan Desk dengan OPD dalam melaksanakan reviu dan refocusing terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran untuk menajamkan analisis penyempurnaan IKU.	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
13	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Nomor B/453/AA. 05/2021 tanggal 21 Maret 2021	Indikator kinerja individu belum selaras dengan kinerja organisasi serta belum dijadikan acuan dalam penyusunan SKP.	Telah disusunnya SKP Juli-Desember 2021 yang sesuai dengan Permenpan 18 Tahun 2021.	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
14	Hasil Reviu Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 Nomor 094/031/Non-PKPT/KS/2021 tanggal 21 Juni 2021	Masih kurangnya keterhubungan dan kesesuaian program dengan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dalam dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023	Dokumen Evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
15	Hasil Reviu Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 Nomor 094/031/Non-PKPT/KS/2021 tanggal 21 Juni 2021	Masih kurangnya keterhubungan dan kesesuaian program dengan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dalam dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023	Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
16	Laporan Pelaksanaan Reviu atas Hasil Penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemkab Banyumas Tahun 2019, BPKP Perwakilan Jateng No. RR-1083/PW11/3.2/2019 tanggal 23 Desember 2019	Belum optimalnya administrasi seluruh dokumen pendukung infrastruktur SPIP secara tertib, baik data SPIP baseline, self assessment dan reviu	Terdapat Perbup No 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemkab Banyumas	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
17	Laporan Pelaksanaan Reviu atas Hasil Penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemkab Banyumas Tahun 2019, BPKP Perwakilan Jateng No. RR-1083/PW11/3.2/2019 tanggal 23 Desember 2019	Belum optimalnya OPD dalam menyusun dan mengimplementasikan RTP yang mencakup seluruh program dan kegiatan OPD	OPD telah menyusun Rencana Tindak Pengendalian	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
18	Laporan Pelaksanaan Reviu atas Hasil Penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemkab Banyumas Tahun 2019, BPKP Perwakilan Jateng No. RR-1083/PW11/3.2/2019 tanggal 23 Desember 2019	Belum optimalnya OPD dalam menyusun dan mengimplementasikan RTP yang mencakup seluruh program dan kegiatan OPD	Terdapat Perbup No 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemkab Banyumas	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
19	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Kemenpan RB Nomor B/402/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021	Masih perlunya penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah dan OPD.	Telah disusun Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2019 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023.	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
20	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Kemenpan RB Nomor B/402/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021	Masih perlunya penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah dan OPD.	Pada saat ini, sedang dilaksanakan pembahasan proses evaluasi perbup Road Map yang disesuaikan dengan Road Map Nasional tahun 2020-2025.	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
21	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Kemenpan RB Nomor B/402/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021	Peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif, dan dinamis belum optimal dan perlu disesuaikan dengan karakter layanan utama di masing-masing unit kerja.	Telah diterbitkan SK Agen Perubahan di setiap Perangkat Daerah.	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
22	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Kemenpan RB Nomor B/402/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021	Peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif, dan dinamis belum optimal dan perlu disesuaikan dengan karakter layanan utama di masing-masing unit kerja.	Rencana Kerja agen perubahan Perangkat Daerah.	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
23	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Kemenpan RB Nomor B/402/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021	Peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif, dan dinamis belum optimal dan perlu disesuaikan dengan karakter layanan utama di masing-masing unit kerja.	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi atas Rencana Kerja Agen Perubahan agar dengan karakter layanan utama Perangkat Daerah.	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
24	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Kemenpan RB Nomor B/402/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021	Belum dilakukan pemetaan terhadap seluruh produk hukum yang telah dan akan terbit, sehingga dapat diidentifikasi peraturan yang tidak sinkron/harmonis dengan kebijakan lain dan memiliki potensi memperlambat proses pelayanan publik. Selanjutnya hasil identifikasi tersebut belum ditindaklanjuti dengan penyederhanaan atau deregulasi kebijakan.	Telah dilakukan pemetaan terhadap produk hukum yang telah dan akan terbit, sehingga dapat diidentifikasi peraturan yang tidak sinkron/harmonis dengan kebijakan lain dan memiliki potensi memperlambat proses pelayanan publik. Hasil inventarisasi : Terdapat 21 (dua puluh satu) Peraturan Daerah masuk dalam Propemperda tahun 2021. Terdapat 20 (dua puluh) Peraturan Daerah dan 6 (enam) Peraturan Bupati yang terdampak dengan diundangkannya UU Cipta Kerja sehingga harus dilakukan perubahan.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
25	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Kemenpan RB Nomor B/402/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021	Kabupaten Banyumas belum selesai atau masih dalam proses menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d. 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional serta beberapa Surat Menteri Dalam Negeri terkait Penyederhanaan Birokrasi.	Telah dilakukan penyederhanaan birokrasi pada DPMPSTP sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPSTP Kabupaten Banyumas.	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
26	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Kemenpan RB Nomor B/402/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021	Kabupaten Banyumas belum selesai atau masih dalam proses menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d. 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional serta beberapa Surat Menteri Dalam Negeri terkait Penyederhanaan Birokrasi.	Telah dilakukan pengusulan penyederhanaan birokrasi Kabupaten Banyumas kepada Mendagri sebanyak 231 Jabatan Eselon IV, dan telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kemendagri dan Provinsi Jawa Tengah.	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
27	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Kemenpan RB Nomor B/402/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021	Penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas belum disempurnakan dengan Grand Design pengembangan SPBE serta pengintegrasian sistem aplikasi baik dalam manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat/ stakeholder.	Telah dilakukan penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas : a)Layanan Bidang Perencanaan dan keuangan, telah dilakukan integrasi aplikasi dari SIPD, e-Budgeting , Jegos, e-Monev, e-SAKIP b)Layanan Bidang SDM (Simpatik Integrasi dengan e- SAKIP) c)Layanan Bidang Pengadaan (Sirup dengan Jegos) d)Layanan Bidang Pengawasan (WBS) e)Layanan Bidang Pelayanan Publik (Si Panjimas, Sim PKB, Mas Basid)	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
28	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Kemenpan RB Nomor B/402/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021	Belum optimalnya implementasi pelayanan publik khususnya di tingkat perangkat daerah dalam hal pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan menginformasikan hasil survei eksternal kepada stakeholder serta menindaklanjuti hasil survei eksternal terutama terhadap komponen survei yang memiliki nilai rendah dengan melakukan perbaikan€¢ perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan.	Telah menginformasikan hasil survei eksternal kepada stakeholder melalui media sosial, media cetak dan elektronik	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
29	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Kemenpan RB Nomor B/402/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021	Belum optimalnya implementasi pelayanan publik khususnya di tingkat perangkat daerah dalam hal pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan menginformasikan hasil survei eksternal kepada stakeholder serta menindaklanjuti hasil survei eksternal terutama terhadap komponen survei yang memiliki nilai rendah dengan melakukan perbaikan€¢ perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan.	Telah dilakukan pelaporan secara rutin Indeks Kepuasan Masyarakat dari setiap Perangkat Daerah	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
30	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Kemenpan RB Nomor B/402/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021	Penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas belum disempurnakan dengan Grand Design pengembangan SPBE serta pengintegrasian sistem aplikasi baik dalam manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat/ stakeholder.	Hasil evaluasi SPBE Kabupaten Banyumas Tahun 2020 dengan nilai 3,09 dengan predikat Baik.	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
31	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Kemenpan RB Nomor B/402/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021	Belum optimalnya peran APIP sebagai Quality Assurance and Consulting yang bukan hanya berperan terhadap hal yang terkait dengan keuangan tetapi juga terhadap hal yang terkait dengan kinerja;	Optimalisasi APIP adanya Laporan hasil pendampingan penyusunan Rencana Tidak Pengendalian (RTP) tahun 2021 pada Perangkat Daerah	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
32	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Kemenpan RB Nomor B/402/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021	Belum optimalnya peran APIP sebagai Quality Assurance and Consulting yang bukan hanya berperan terhadap hal yang terkait dengan keuangan tetapi juga terhadap hal yang terkait dengan kinerja;	Dibangunnya aplikasi Konsultasi Inspektorat	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF
33	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Kemenpan RB Nomor B/402/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021	Pengelolaan sistem manajemen SDM belum menindaklanjuti pemanfaatan hasil assessment sebagai dasar pengembangan karier individu berbasis kompetensi, menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau HCDP secara menyeluruh dan memetakan talenta/ talent pool sebagai dasar penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan.	BKPSDM melakukan uji kompetensi bagi pegawai yang diusulkan kenaikan kelas jabatan dan promosi jabatan.	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
34	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Kemenpan RB Nomor B/402/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021	Pengelolaan sistem manajemen SDM belum menindaklanjuti pemanfaatan hasil assessment sebagai dasar pengembangan karier individu berbasis kompetensi	Pelaksanaan seleksi terbuka untuk JPT dan Kepala Perangkat Daerah.	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
35	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Kemenpan RB Nomor B/402/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021	Belum optimalnya peran APIP sebagai Quality Assurance and Consulting yang bukan hanya berperan terhadap hal yang terkait dengan keuangan tetapi juga terhadap hal yang terkait dengan kinerja;	Pendampingan APIP dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF
36	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Kemenpan RB Nomor B/402/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021	Pengelolaan sistem manajemen SDM belum menindaklanjuti pemanfaatan hasil assessment sebagai dasar menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau HCDP secara menyeluruh dan memetakan talenta/ talent pool sebagai dasar penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan.	Rekap rencana kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai.	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
37	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Kemenpan RB Nomor B/402/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021	Ukuran kinerja individu belum sepenuhnya berorientasi hasil sesuai dengan levelnya, dan belum ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja sampai dengan individu untuk dijadikan dasar dalam memberikan apresiasi/ penghargaan ataupun punishment bagi pegawai.	Dibangunnya aplikasi Simpatik Integrasi yang memuat Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, SKP, kontrak kerja bulanan dan catatan harian dari setiap pegawai yang mempengaruhi pemberian TPP.	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
38	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Kemenpan RB Nomor B/402/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021	Ukuran kinerja individu belum sepenuhnya berorientasi hasil sesuai dengan levelnya, dan belum ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja sampai dengan individu untuk dijadikan dasar dalam memberikan apresiasi/ penghargaan ataupun punishment bagi pegawai.	Melakukan penyempurnaan (review) penjenjangan kinerja (Penyusunan PK berdasarkan hasil review Cascading) dalam aplikasi e SAKIP dan Simpatik terintegrasi.	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
39	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Kemenpan RB Nomor B/402/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021	Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang mendorong setiap unit kerja mampu mengidentifikasi dan melakukan pengendalian risiko yang melekat pada upaya pencapaian kinerja, sebagai salah satu upaya optimalisasi pelaksanaan pengendalian internal	Telah disusunnya Perbub No. 64 Tahun 2010 tentang SPIP Kabupaten Banyumas, Perbup 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemkab Banyumas dan dibangunnya aplikasi MRI.	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
40	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Kemenpan RB Nomor B/402/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021	Ukuran kinerja individu belum sepenuhnya berorientasi hasil sesuai dengan levelnya, dan belum ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja sampai dengan individu untuk dijadikan dasar dalam memberikan apresiasi/ penghargaan ataupun punishment bagi pegawai;	Diundangkannya Perbup Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
41	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Kemenpan RB Nomor B/402/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021	Belum optimalnya Kebijakan pengawasan internal seperti penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, dan kebijakan benturan kepentingan.	Telah dibangunnya aplikasi Lapak Aduan	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan

Kolom e diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

3.3 RENCANA PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Form 1.c.

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Banyumas

PEMDA : PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN : 2022

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	Kurang Memadai	- Belum dilakukan pemetaan terhadap seluruh produk hukum yang telah dan akan terbit, sehingga dapat diidentifikasi peraturan yang tidak sinkron/harmonis dengan kebijakan lain dan memiliki potensi memperlambat proses pelayanan publik. Selanjutnya hasil identifikasi tersebut belum ditindaklanjuti dengan penyederhanaan atau deregulasi kebijakan.	Memadai		Kurang Memadai	- Belum dilakukan pemetaan terhadap seluruh produk hukum yang telah dan akan terbit, sehingga dapat diidentifikasi peraturan yang tidak sinkron/harmonis dengan kebijakan lain dan memiliki potensi memperlambat proses pelayanan publik. Selanjutnya hasil identifikasi tersebut belum ditindaklanjuti dengan penyederhanaan atau deregulasi kebijakan.
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	-	-	Memadai		Memadai	
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	Kurang Memadai	- Belum optimalnya Kebijakan pengawasan internal seperti penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, dan kebijakan benturan kepentingan. - Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang mendorong setiap unit kerja mampu mengidentifikasi dan melakukan pengendalian risiko yang melekat pada upaya pencapaian kinerja, sebagai salah satu upaya optimalisasi pelaksanaan pengendalian internal	Kurang Memadai	- Belum rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko	Kurang Memadai	- Belum optimalnya Kebijakan pengawasan internal seperti penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, dan kebijakan benturan kepentingan. - Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang mendorong setiap unit kerja mampu mengidentifikasi dan melakukan pengendalian risiko yang melekat pada upaya pencapaian kinerja, sebagai salah satu upaya optimalisasi pelaksanaan pengendalian internal

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
			<ul style="list-style-type: none"> - Indikator kinerja individu belum selaras dengan kinerja organisasi serta belum dijadikan acuan dalam penyusunan SKP. - Masih kurangnya keterhubungan dan kesesuaian program dengan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dalam dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 - Peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif, dan dinamis belum optimal dan perlu disesuaikan dengan karakter layanan utama di masing-masing unit kerja. - Peta proses bisnis belum sepenuhnya menggambarkan proses pencapaian kinerja pada setiap OPD, dan menjadi acuan dalam perumusan cascading kinerja utama pada setiap OPD sampai level individu, untuk memastikan bahwa setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas dalam pencapaian kinerja di masing-masing OPD - Sistem pengendalian internal dengan mengidentifikasi risiko kemungkinan kegagalan pencapaian target kinerja belum sepenuhnya diimplementasikan di seluruh OPD 				<ul style="list-style-type: none"> - Indikator kinerja individu belum selaras dengan kinerja organisasi serta belum dijadikan acuan dalam penyusunan SKP. - Masih kurangnya keterhubungan dan kesesuaian program dengan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dalam dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 - Peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif, dan dinamis belum optimal dan perlu disesuaikan dengan karakter layanan utama di masing-masing unit kerja. - Peta proses bisnis belum sepenuhnya menggambarkan proses pencapaian kinerja pada setiap OPD, dan menjadi acuan dalam perumusan cascading kinerja utama pada setiap OPD sampai level individu, untuk memastikan bahwa setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas dalam pencapaian kinerja di masing-masing OPD - Sistem pengendalian internal dengan mengidentifikasi risiko kemungkinan kegagalan pencapaian target kinerja belum sepenuhnya diimplementasikan di seluruh OPD - Belum rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya implementasi pelayanan publik khususnya di tingkat perangkat daerah dalam hal pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan menginformasikan hasil survei eksternal kepada stakeholder serta menindaklanjuti hasil survei eksternal terutama terhadap komponen survei yang memiliki nilai rendah dengan melakukan perbaikanâ€¢ perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan. - Belum optimalnya OPD dalam menyusun dan mengimplementasikan RTP yang mencakup seluruh program dan kegiatan OPD - Kabupaten Banyumas belum selesai atau masih dalam proses menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d. 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional serta beberapa Surat Menteri Dalam Negeri terkait Penyederhanaan Birokrasi. - Masih perlunya penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah dan OPD. 	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko 	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya implementasi pelayanan publik khususnya di tingkat perangkat daerah dalam hal pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan menginformasikan hasil survei eksternal kepada stakeholder serta menindaklanjuti hasil survei eksternal terutama terhadap komponen survei yang memiliki nilai rendah dengan melakukan perbaikanâ€¢ perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan. - Belum optimalnya OPD dalam menyusun dan mengimplementasikan RTP yang mencakup seluruh program dan kegiatan OPD - Kabupaten Banyumas belum selesai atau masih dalam proses menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d. 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional serta beberapa Surat Menteri Dalam Negeri terkait Penyederhanaan Birokrasi. - Masih perlunya penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah dan OPD. - Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Kelemahan pengelolaan Dana Bergulir pada Pemkab Banyumas yaitu di antaranya pengelolaan saldo Kas Pokok dan Bunga atas Pokok Dana Bergulir yang terakumulasi pada rekening di PT BPR BKK Purwokerto tidak sesuai ketentuan, Dana Pinjaman Bergulir pada Bank Jateng sudah tidak dikelola dan saldonya tidak dapat diakses oleh Pemkab Banyumas, serta fungsi penagihan Dana Pinjaman Bergulir tidak optimal. - Penatausahaan dan Pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Banyumas belum tertib antara lain informasi identitas aset tetap dalam Kartu Inventaris Barang belum sepenuhnya dicatat secara tepat dan lengkap, aset tetap berupa tanah jalan lingkungan belum seluruhnya tercatat, serta pengamanan barang milik daerah belum tertib. - Pengelolaan Barang Milik Daerah belum memadai yaitu diantaranya kondisi barang/aset pada KIB tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, kelemahan dalam kapitalisasi Aset Tetap, aset eks perjanjian kemitraan Bangun Guna Serah serta Aset PSU belum dinilai dan dicatat sesuai ketentuan, dan Pemkab Banyumas belum menyesuaikan regulasi sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi sesuai Permendagri Nomor 108 Tahun 2016. - Pertanggungjawaban hibah barang pada Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman tidak didukung dokumen yang memadai yaitu berupa NPHD dan BAST sebesar Rp. 14.269.067.000,00. 	Memadai		Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Kelemahan pengelolaan Dana Bergulir pada Pemkab Banyumas yaitu di antaranya pengelolaan saldo Kas Pokok dan Bunga atas Pokok Dana Bergulir yang terakumulasi pada rekening di PT BPR BKK Purwokerto tidak sesuai ketentuan, Dana Pinjaman Bergulir pada Bank Jateng sudah tidak dikelola dan saldonya tidak dapat diakses oleh Pemkab Banyumas, serta fungsi penagihan Dana Pinjaman Bergulir tidak optimal. - Penatausahaan dan Pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Banyumas belum tertib antara lain informasi identitas aset tetap dalam Kartu Inventaris Barang belum sepenuhnya dicatat secara tepat dan lengkap, aset tetap berupa tanah jalan lingkungan belum seluruhnya tercatat, serta pengamanan barang milik daerah belum tertib. - Pengelolaan Barang Milik Daerah belum memadai yaitu diantaranya kondisi barang/aset pada KIB tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, kelemahan dalam kapitalisasi Aset Tetap, aset eks perjanjian kemitraan Bangun Guna Serah serta Aset PSU belum dinilai dan dicatat sesuai ketentuan, dan Pemkab Banyumas belum menyesuaikan regulasi sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi sesuai Permendagri Nomor 108 Tahun 2016. - Pertanggungjawaban hibah barang pada Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman tidak didukung dokumen yang memadai yaitu berupa NPHD dan BAST sebesar Rp. 14.269.067.000,00.

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
			- Reviu dan refocusing terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran belum mengacu pada penyempurnaan IKU dan memastikan bahwa anggaran dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis.				- Reviu dan refocusing terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran belum mengacu pada penyempurnaan IKU dan memastikan bahwa anggaran dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis.
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas belum disempurnakan dengan Grand Design pengembangan SPBE serta pengintegrasian sistem aplikasi baik dalam manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat/ stakeholder. - Penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas belum disempurnakan dengan Grand Design pengembangan SPBE serta pengintegrasian sistem aplikasi baik dalam manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat/ stakeholder. - Pengelolaan sistem manajemen SDM belum menindaklanjuti pemanfaatan hasil assessment sebagai dasar menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau HCDP secara menyeluruh dan memetakan talenta/ talent pool sebagai dasar penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan. - Pengelolaan sistem manajemen SDM belum menindaklanjuti pemanfaatan hasil assessment sebagai dasar pengembangan karier individu berbasis kompetensi - Pengelolaan sistem manajemen SDM belum menindaklanjuti pemanfaatan hasil assessment sebagai dasar 	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko - Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja) 	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas belum disempurnakan dengan Grand Design pengembangan SPBE serta pengintegrasian sistem aplikasi baik dalam manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat/ stakeholder. - Penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas belum disempurnakan dengan Grand Design pengembangan SPBE serta pengintegrasian sistem aplikasi baik dalam manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat/ stakeholder. - Pengelolaan sistem manajemen SDM belum menindaklanjuti pemanfaatan hasil assessment sebagai dasar menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau HCDP secara menyeluruh dan memetakan talenta/ talent pool sebagai dasar penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan. - Pengelolaan sistem manajemen SDM belum menindaklanjuti pemanfaatan hasil assessment sebagai dasar pengembangan karier individu berbasis kompetensi - Pengelolaan sistem manajemen SDM belum menindaklanjuti pemanfaatan hasil assessment sebagai dasar pengembangan

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
			<p>pengembangan karier individu berbasis kompetensi, menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau HCDP secara menyeluruh dan memetakan talenta/ talent pool sebagai dasar penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan.</p> <p>- Ukuran kinerja individu belum sepenuhnya berorientasi hasil sesuai dengan levelnya, dan belum ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja sampai dengan individu untuk dijadikan dasar dalam memberikan apresiasi/ penghargaan ataupun punishment bagi pegawai.</p>				<p>karier individu berbasis kompetensi, menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau HCDP secara menyeluruh dan memetakan talenta/ talent pool sebagai dasar penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan.</p> <p>- Ukuran kinerja individu belum sepenuhnya berorientasi hasil sesuai dengan levelnya, dan belum ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja sampai dengan individu untuk dijadikan dasar dalam memberikan apresiasi/ penghargaan ataupun punishment bagi pegawai.</p>
7	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF	Kurang Memadai	<p>- Ukuran kinerja individu belum sepenuhnya berorientasi hasil sesuai dengan levelnya, dan belum ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja sampai dengan individu untuk dijadikan dasar dalam memberikan apresiasi/ penghargaan ataupun punishment bagi pegawai;</p> <p>- Belum optimalnya pembinaan dan fasilitasi terhadap Tim Counterpart untuk melakukan perbaikan secara mandiri (self improvement) atas kondisi permasalahan yang ada untuk peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP</p> <p>- Belum optimalnya peran APIP sebagai Quality Assurance and Consulting yang bukan hanya berperan terhadap hal yang terkait dengan keuangan tetapi juga terhadap hal yang terkait dengan kinerja;</p>	Memadai		Kurang Memadai	<p>- Ukuran kinerja individu belum sepenuhnya berorientasi hasil sesuai dengan levelnya, dan belum ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja sampai dengan individu untuk dijadikan dasar dalam memberikan apresiasi/ penghargaan ataupun punishment bagi pegawai;</p> <p>- OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko - Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)</p> <p>- Belum optimalnya peran APIP sebagai Quality Assurance and Consulting yang bukan hanya berperan terhadap hal yang terkait dengan keuangan tetapi juga terhadap hal yang terkait dengan kinerja;</p>

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas evaluasi program masih perlu ditingkatkan dengan melakukan analisis yang didasarkan pada capaian hasil program serta keterpaduan lintas OPD untuk mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran - Pelaksanaan Belanja Hibah tidak sesuai dengan ketentuan diantaranya kegiatan evaluasi dan monitoring penggunaan Hibah Uang belum dilaksanakan serta Hibah Uang kepada KONI direalisasikan tidak sesuai dengan NPHD sehingga tidak dapat diketahui ketepatan penggunaannya. - Pengelolaan bantuan keuangan desa pada Kabupaten Banyumas tidak memadai antara lain penganggaran tidak melalui e-planning. 	Memadai		Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas evaluasi program masih perlu ditingkatkan dengan melakukan analisis yang didasarkan pada capaian hasil program serta keterpaduan lintas OPD untuk mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran - Pelaksanaan Belanja Hibah tidak sesuai dengan ketentuan diantaranya kegiatan evaluasi dan monitoring penggunaan Hibah Uang belum dilaksanakan serta Hibah Uang kepada KONI direalisasikan tidak sesuai dengan NPHD sehingga tidak dapat diketahui ketepatan penggunaannya. - Pengelolaan bantuan keuangan desa pada Kabupaten Banyumas tidak memadai antara lain penganggaran tidak melalui e-planning.

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

4.1 PENETAPAN TUJUAN

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuannya adalah untuk pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten.

Bupati Banyumas Periode 2018-2023 telah menetapkan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD. Visi Kabupaten Banyumas “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri” yang dijabarkan kedalam delapan Misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida, yaitu:

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik;
- b. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
- e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;
- h. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Kedelapan misi tersebut diterjemahkan melalui tujuan dengan indikator tujuan, serta sasaran dan indikator sasaran yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indek Reformasi Birokrasi
			Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
			Nilai Survey Eksternal Persepsi Korupsi
			Nilai Maturitas SPIP

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
		Meningkatnya birokrasi yang kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
		Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)
2	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat		Indek Pembangunan Manusia (IPM)
		Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)
		Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nilai Kabupaten Layak Anak
3	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan		Persentase penduduk miskin
		Meningkatnya perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase Lingkungan Permukiman yang layak huni Persentase penanganan korban bencana
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian		Pertumbuhan Ekonomi
		Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan dan perdagangan	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan
		Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pertanian Kehutanan dan Perikanan
			PDRB per Kapita
5	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis		Indeks Ketahanan Pangan
		Meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agrobisnis untuk ketersediaan pangan utama	Persentase Ketersediaan Pangan Utama
6	Perwujudan kawasan peruntukan industri dan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja		Persentase Pertumbuhan Nilai investasi Daerah
		Meningkatnya investasi daerah	Nilai investasi daerah
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		Meningkatnya kesempatan berusaha	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Persentase Kinerja Pengelolaan Sampah
		Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang
		Meningkatnya penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim	Indeks Resiko Bencana
7	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat		Persentase Kinerja Infrastruktur
		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dan memadai	Persentase Kinerja Infrastruktur Perhubungan Persentase Kinerja Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
8	Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif		Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD
		Meningkatnya Industri Pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata
		Meningkatnya pertumbuhan pelaku ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif
			Persentase Koperasi Sehat
			Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro
9	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat		Angka Kriminalitas
		Meningkatnya kerukunan dan peran masyarakat dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram	Persentase kriminalitas yang tertangani
		Meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah	Persentase Pelestarian Budaya Banyumas
		Meningkatnya peran dan daya saing pemuda	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMKAB
KABUPATEN BANYUMAS**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas	
Tahun Penilaian	: 2022	
Periode Yang dinilai	: Periode Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023	
Sumber Data	: Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023	
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 1	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik
	Tujuan 2	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
	Tujuan 3	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan
	Tujuan 4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian
	Tujuan 5	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis
	Tujuan 6	Perwujudan kawasan peruntukan industri dan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja
	Tujuan 7	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat
	Tujuan 8	Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif
	Tujuan 9	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemda	Tujuan 1	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik
	Tujuan 2	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
	Tujuan 3	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan
	Tujuan 4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian
	Tujuan 5	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2022
Periode Yang dinilai	: Periode Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
Sumber Data	: Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
	Tujuan 6 Perwujudan kawasan peruntukan industri dan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja
	Tujuan 7 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat
	Tujuan 8 Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif
	Tujuan 9 Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat
Nama Dinas Terkait Tujuan 1	SETDA
	BAPPEDA LITBANG
	BKPSDM
	INSPEKTORAT
	BKAD
	DINKOMINFO
	DINKES
	DINSOSPERMASDES
	DINDUKCAPIL
Nama Dinas Terkait Tujuan 2	DINARPUSDA
	DINDIK
	DINKES
	DPPKBP3A
Nama Dinas Terkait Tujuan 3	DINPERKIM
	DINSOSPERMASDES
Nama Dinas Terkait Tujuan 4	DINPERINDAG
	DINPERTAN KP
Nama Dinas Terkait Tujuan 5	DINPERTAN KP
Nama Dinas Terkait Tujuan 6	DPMPTSP
	DINAKERKOP UKM
	DLH
	DINPERKIM
	BPBD
Nama Dinas Terkait Tujuan 7	DINPERKIM
	DPU
	DINHUB
Nama Dinas Terkait Tujuan 8	DINPORABUDPAR
	DINAKERKOP UKM
Nama Dinas Terkait Tujuan 9	SATPOL PP
	DINPORABUDPAR
Sasaran Strategis RPJMD	Sasaran 1.1 Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
	Sasaran 1.2 Meningkatnya birokrasi yang kapabel
	Sasaran 1.3 Meningkatnya pelayanan publik yang prima
	Sasaran 2.1 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
	Sasaran 2.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	Sasaran 2.3 Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk
	Sasaran 2.4 Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak
	Sasaran 3.1 Meningkatnya perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin
	Sasaran 4.1 Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan dan perdagangan

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2022
Periode Yang dinilai	: Periode Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
Sumber Data	: Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
	Sasaran 4.2 Meningkatkan produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani
	Sasaran 5.1 Meningkatkan inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agrobisnis untuk ketersediaan pangan utama
	Sasaran 6.1 Meningkatkan investasi daerah
	Sasaran 6.2 Meningkatkan kesempatan berusaha
	Sasaran 6.3 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup
	Sasaran 6.4 Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan
	Sasaran 6.5 Meningkatkan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim
	Sasaran 7.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dan memadai
	Sasaran 8.1 Meningkatkan Industri Pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal
	Sasaran 8.2 Meningkatkan pertumbuhan pelaku ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
	Sasaran 9.1 Meningkatkan kerukunan dan peran masyarakat dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram
	Sasaran 9.2 Meningkatkan kelestarian kebudayaan daerah
	Sasaran 9.3 Meningkatkan peran dan daya saing pemuda
Indikator Kinerja Sasaran RPJMD	1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
	2 Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah
	3 Nilai Survey Eksternal Persepsi Korupsi
	4 Nilai Maturitas SPIP
	5 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	6 Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
	7 Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)
	8 Rata-rata Lama Sekolah
	9 Harapan Lama Sekolah
	10 Usia Harapan Hidup (UHH)
	11 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
	12 Indeks Pembangunan Gender (IPG)
	13 Nilai Kabupaten Layak Anak
	14 Persentase Lingkungan Permukiman yang layak huni
	15 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
	16 Persentase penanganan korban bencana
	17 Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan
	18 Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor
	19 Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pertanian Kehutanan dan Perikanan

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas	
Tahun Penilaian	: 2022	
Periode Yang dinilai	: Periode Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023	
Sumber Data	: Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023	
	20 Persentase Ketersediaan Pangan Utama	
	21 Nilai investasi daerah	
	22 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	
	23 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	
	24 Persentase Kinerja Pengelolaan Sampah	
	25 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	
	26 Indeks Resiko Bencana	
	27 Persentase Kinerja Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	28 Persentase Kinerja Infrastruktur Perhubungan	
	29 Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata	
	30 Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	
	31 Persentase Koperasi Sehat	
	32 Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	
	33 Persentase kriminalitas yang tertangani	
	34 Persentase Pelestarian Budaya Banyumas	
	35 Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan 1	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik
	Sasaran 1.1	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
	Sasaran 1.2	Meningkatnya birokrasi yang kapabel
	Sasaran 1.3	Meningkatnya pelayanan publik yang prima
	Tujuan 2	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
	Sasaran 2.1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
	Sasaran 2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	Sasaran 2.3	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk
	Sasaran 2.4	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak
	Tujuan 3	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan
	Sasaran 3.1	Meningkatnya perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin
	Tujuan 4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian
	Sasaran 4.1	Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan dan perdagangan
	Sasaran 4.2	Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani
	Tujuan 5	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis
	Sasaran 5.1	Meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agrobisnis untuk ketersediaan pangan utama
	Tujuan 6	Perwujudan kawasan peruntukan industri dan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja
	Sasaran 6.1	Meningkatnya investasi daerah
	Sasaran 6.2	Meningkatnya kesempatan berusaha
	Sasaran 6.3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2022
Periode Yang dinilai	: Periode Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
Sumber Data	: Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
	Sasaran 6.4 Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan
	Sasaran 6.5 Meningkatkan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim
	Tujuan 7 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat
	Sasaran 7.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dan memadai
	Tujuan 8 Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif
	Sasaran 8.1 Meningkatkan Industri Pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal
	Sasaran 8.2 Meningkatkan pertumbuhan pelaku ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
	Tujuan 9 Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat
	Sasaran 9.1 Meningkatkan kerukunan dan peran masyarakat dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram
	Sasaran 9.2 Meningkatkan kelestarian kebudayaan daerah
	Sasaran 9.3 Meningkatkan peran dan daya saing pemuda

4.2 IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran:

Form 3.a : Penetapan konteks risiko strategis Pemda

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PEMKAB

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2022
Periode yang dinilai	: Periode Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
Tujuan Strategis	: Tujuan 1 Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik : Tujuan 2 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat : Tujuan 3 Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan : Tujuan 4 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian : Tujuan 5 Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis : Tujuan 6 Perwujudan kawasan peruntukan industri dan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja : Tujuan 7 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat : Tujuan 8 Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif : Tujuan 9 Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik										
	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Perumusan cascading dan indikator kinerja belum berpedoman pada proses bisnis organisasi	501	Kepala Daerah	Kurangnya kualitas SDM yang menangani perencanaan	Internal	C	Nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja tidak optimal	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait
							Belum optimalnya tingkat pemahaman OPD tentang peta proses bisnis	Internal	C	Target kinerja yang ditetapkan tidak tercapai optimal	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait

No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
				Kinerja Individu ASN belum selaras dengan tujuan OPD dan kurang mendukung pencapaian kinerja Pemkab sehingga nilai SAKIP pada komponen pengukuran kinerja individu tidak optimal	503	Kepala Daerah	ASN belum memahami tujuan OPD	Internal	C	Nilai SAKIP pada komponen pengukuran kinerja tidak optimal	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat
				Pelaporan kinerja belum optimal menggambarkan capaian kinerja organisasi secara utuh	401	Kepala Daerah	SDM Penyusun laporan kurang memahami sepenuhnya ketentuan penyusunan laporan kinerja	Internal	C	Nilai SAKIP pada komponen pelaporan kinerja tidak optimal	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait
				Kurangnya respon dan komitmen organisasi dalam menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja	601	Kepala Daerah	Kurangnya pemahaman OPD mengenai tindak lanjut yang harus dilakukan	Internal	C	Nilai SAKIP pada komponen evaluasi internal tidak optimal	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait
							Kurangnya koordinasi OPD dengan evaluator (APIP) terkait tindak lanjut evaluasi akuntabilitas kinerja	Internal	C	Nilai SAKIP pada komponen evaluasi internal tidak optimal	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait
							Belum tertib dan terkelola dengan baiknya pengarsipan dokumen pendukung	Internal	C	Kinerja kurang akuntabel karena dokumen pendukung tidak tersedia pada saat dibutuhkan	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait

No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
				Penetapan target kinerja yang tidak tepat	501	Kepala Daerah	Kurangnya koordinasi antara OPD dengan Tim Penyusun RPJMD	Internal	C	Nilai SAKIP pada komponen capaian kinerja tidak optimal	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait
Kualitas evaluasi program belum mampu memperbaiki kualitas pelaksanaan maupun hasil program	501	Kepala Daerah	Metode evaluasi program belum tepat	Internal	C	Nilai SAKIP pada komponen evaluasi internal tidak optimal	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait				
Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	Penetapan klasifikasi anggaran belum sesuai ketentuan	502	Kepala Daerah	Kurang optimalnya verifikasi dan reviu rencana anggaran	Internal	C	Tidak tercapainya status WTP terhadap laporan keuangan daerah	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat			
	Belum optimal dan akuntabelnya pengelolaan aset daerah	502	Kepala Daerah	Keterbatasan anggaran untuk menginventarisir seluruh aset daerah	Internal	C	Tidak tercapainya status WTP terhadap laporan keuangan daerah	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat			
				Kurangnya kompetensi dan jumlah SDM pengurus barang OPD	Internal	C	Tidak tercapainya status WTP terhadap laporan keuangan daerah	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat			
	Kelemahan pengelolaan pendapatan daerah karena rentang kendali luasnya wilayah WP	502	Kepala Daerah	Otorisasi atas transaksi pendapatan belum dilaksanakan secara optimal	Internal	C	Tidak tercapainya status WTP terhadap laporan keuangan daerah	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat			
	Kelemahan pengelolaan belanja daerah yang tidak sesuai dengan perencanaan	502	Kepala Daerah	Penegakan integritas sebagai salah satu pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal OPD belum optimal	Internal	C	tidak tercapainya status WTP terhadap laporan keuangan daerah	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat			

No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
				Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	502	Kepala Daerah	Kurangnya SDM yang memiliki standar kompetensi jabatan penyusun laporan keuangan	Internal	C	tidak tercapainya status WTP terhadap laporan keuangan daerah	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat
			Nilai Survey Eksternal Persepsi Korupsi	Masih adanya kasus-kasus pungutan liar dan atau gratifikasi	601	Kepala Daerah	Kurangnya integritas SDM pelaksana pelayanan	Internal	C	Tidak tercapainya nilai survey eksternal persepsi korupsi sesuai target	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat
			Nilai Maturitas SPIP	Informasi mengenai produk, standar, prosedur layanan, pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengaduan belum tersampaikan secara sempurna kepada stakeholder	401	Kepala Daerah	Kurangnya kepedulian tentang pentingnya informasi dan komunikasi dalam pencapaian tujuan	Internal	C	Informasi dan komunikasi tidak efektif	1.Kepala Daerah 2.OPD Terkait
							Kurangnya sosialisasi dan atau internalisasi mengenai produk, standar, prosedur layanan, pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengaduan	Internal	C	Informasi dan komunikasi tidak efektif	1.Kepala Daerah 2.OPD Terkait
				Rendahnya komitmen pimpinan dalam mengkondisikan lingkungan pengendalian di OPD	401	Kepala Daerah	Kurangnya pemahaman pimpinan terhadap SPIP	Internal	C	Nilai SPIP unsur Lingkungan pengendalian rendah	
				Risiko strategis yang tidak teridentifikasi dan teranalisis dengan baik	501	Kepala Daerah	Kurangnya pemahaman OPD tentang risiko	Internal	C	Pencapaian tujuan terhambat	1.Kepala Daerah 2.OPD Terkait

No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
	Meningkatnya pelayanan publik yang prima		Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	Pelayanan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan standar pelayanan	212	Kepala Daerah	Keterbatasan anggaran, sarana prasarana dan SDM	Eksternal	C	Kepuasan Pengguna Layanan rendah	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat
							SOP kurang berkualitas	Eksternal	C	Tidak tercapainya nilai persepsi terhadap kualitas pelayanan publik sesuai target	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat
				Terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh perangkat desa dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah desa	213	Kepala Daerah	SDM Pemerintahan Desa kurang kompeten Kebijakan dan prosedur yang tidak jelas	Internal	C	Tidak tercapainya nilai persepsi terhadap kualitas pelayanan publik sesuai target	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat
				Penerbitan rekomendasi teknis melebihi waktu yang ditetapkan SOP	102	Kepala Daerah	Kurangnya tenaga ahli untuk melakukan survei/ kajian pemberian rekomendasi teknis	Internal	C	Pelayanan pada masyarakat kurang optimal	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat
	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat		Rata-rata Lama Sekolah	Adanya anak Tidak sekolah karena sama sekali tidak sekolah, Putus Sekolah dan tidak melanjutkan	101	Kepala Daerah	Biaya sekolah swasta tinggi dan transportasi mahal atau tindak terjangkau transportasi yang murah	Internal	C	Banyak anak putus sekolah	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat
				Kurangnya kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak	101	Kepala Daerah	Tingkat pendidikan orang tua yang masih rendah	Internal	C	Rendahnya angka melanjutkan sekolah	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
				Bekurangnya minat anak untuk membaca dan belajar	223	Kepala Daerah	Kurang optimalnya fasilitas perpustakaan dengan memanfaatkan teknologi untuk mendukung minat baca dan belajar	Internal	C	Berkurangnya pengunjung perpustakaan	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat
				Kurang Optimalnya Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dalam memberikan pelayanan pendidikan	101	Kepala Daerah	Kurangnya Sosialisasi dan Belum Optimalnya Mutu Pendidikan Non Formal/ Program Kesetaraan Paket A dan Paket B	Internal	C	Berkurangnya nilai APM SD dan SMP	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat
			Harapan Lama Sekolah	Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar kurang merata	101	Kepala Daerah	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang kurang tepat	Internal	C	Kuantitas dan Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan byang didistribusikan elum memenuhi kebutuhan sekolah	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat
							Kurangnya Guru yang berstatus sebagai PNS dan masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru Non ASN	Internal	C	Proses pembelajaran di sekolah formal maupun non formal belum optimal	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak				
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
							Kurangnya peningkatan kompetensi guru	Internal	C	Proses pembelajaran di sekolah formal maupun non formal belum optimal	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat			
							Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang kurang tepat	Internal	C	Ketersediaan Pendidik dan Tenaga pendidikan belum merata memenuhi kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat			
							Kurang meratanya sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama negeri	101	Kepala Daerah	Keterbatasan anggaran	Internal	C	Angka Harapan Lama Sekolah tidak tercapai	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat													
			Usia Harapan Hidup (UHH)				Kurangnya kesadaran masyarakat terkait gizi seimbang serta pentingnya olahraga	102	Kepala Daerah	Kurangnya efektifnya Sosialisasi kepada masyarakat terkait Pola Hidup Sehat	Internal	C	Banyaknya masyarakat di usia produktif yang menderita sakit kronis dan akut	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat
							Pelayanan kesehatan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat	102	Kepala Daerah	Belum optimalnya penanganan Angka Kematian Ibu (AKI)	Internal	C	Meningkatnya kematian ibu, bayi dan balita	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat
							Kurangnya Jumlah Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan				Internal	C	Tingkat Kesehatan Masyarakat Rendah	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
							Adanya bencana alam maupun non alam yang menyebabkan kematian	Eksternal	UC	Meningkatnya kematian ibu, bayi dan balita	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat
				Masih ada masyarakat yang membuang limbah sembarangan	102	Kepala Daerah	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengolahan limbah	Internal	C	Lingkungan tidak sehat	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat
	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Kegagalan program keluarga berencana	214	Kepala Daerah	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya KB	Internal	C	Laju pertumbuhan laju penduduk tidak terkendali	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat
							Kurangnya sosialisasi dari Penyuluh KB	Internal	C	Laju pertumbuhan laju penduduk tidak terkendali	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat
	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Masih kurangnya perempuan dalam mengakses, mengontrol, berpartisipasi dan memperoleh manfaat dalam pelayanan kesehatan, pendidikan dan ekonomi	208	Kepala Daerah	Masih adanya persepsi masyarakat yang kurang terkait keterbatasan peran perempuan dalam pendidikan, kesehatan dan kegiatan ekonomi	Internal	C	Indek Pembangunan Gender tidak tercapai sesuai target	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat
			Nilai Kabupaten Layak Anak	Belum terpenuhinya penguatan kelembagaan dalam rangka pemenuhan hak anak	208	Kepala Daerah	Kurangnya sumber daya manusia (SDM) terlatih Konvensi Hak Anak dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan	Internal	C	Nilai Kabupaten Layak Anak tidak tercapai sesuai target	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait

No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
			Tidak terpenuhinya Klaster Hak Anak	208	Kepala Daerah	Kurangnya anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	Internal	C	Nilai Kabupaten Layak Anak tidak tercapai sesuai target	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait	
			Tidak terpenuhinya hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus.			Internal	C	Nilai Kabupaten Layak Anak tidak tercapai sesuai target	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait		
	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan										
	Meningkatnya perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin		Persentase Lingkungan Permukiman yang layak huni	Bertambahnya pemukiman tidak layak huni	104	Kepala Daerah	Penduduk miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah layak huni	Internal	C	Penduduk miskin tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait

No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Belum semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terpenuhi kebutuhan dasarnya	106	Kepala Daerah	SDM yang melakukan pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) kurang cermat	Internal	C	Terdapat target PPKS yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait
			Persentase penanganan korban bencana	Masih adanya korban bencana yang belum tertangani kebutuhan dasarnya	104	Kepala Daerah	Pemutakhiran data tidak dilaksanakan	Internal	C	Penanganan korban bencana tidak tepat sasaran	1. Kepala Daerah 2.Masyarakat 3. OPD Terkait
							SDM Pendata korban bencana kurang cermat	Internal	C	Penanganan korban bencana tidak tepat sasaran	1. Kepala Daerah 2.Masyarakat 3. OPD Terkait
							Kurangnya ketersediaan anggaran penanganan korban bencana	Internal	C	Target penangan korban bencana tidak tercapai	1. Kepala Daerah 2.Masyarakat 3. OPD Terkait
			Masih kurangnya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana		213	Kepala Daerah	kurangnya kapasitas SDM masyarakat dalam penanganan pencegahan bencana	Internal	C	Target penangan korban bencana tidak tercapai	1. Kepala Daerah 2.Masyarakat 3. OPD Terkait

No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian										
	Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan dan perdagangan										
		Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Kurangnya daya saing Industri kecil	331	Kepala Daerah	Industri kecil belum memanfaatkan teknologi industri yang efisien	Internal	C	Harga produk industri kecil tidak bersaing karena biaya produksi tinggi	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait	
		Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	Kurang berkembangnya sektor perdagangan	330	Kepala Daerah	Tidak ada stimulus bagi industri perdagangan	Internal	C	Peningkatan jumlah usaha pada sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor tidak signifikan	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait	
	Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani										
		Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pertanian Kehutanan dan Perikanan	Hasil pertanian, peternakan dan perikanan kurang berdaya bersaing	209	Kepala Daerah	Masih tingginya biaya produksi sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan lokal	Internal	C	Peningkatan Pendapatan sektor sektor pertanian Kehutanan dan Perikanan tidak signifikan	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait	

No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
							Kurangnya penerapan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, peternakan dan perikanan	Internal	C	hasil pertanian, peternakan dan perikanan belum memberikan keuntungan yang tinggi bagi petani	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait
							Masih kurangnya kompetensi SDM Pertanian dan Perikanan dalam meningkatkan daya saing produk Pertanian dan Perikanan	Internal	C	Hasil Produk Pertanian dan Perikanan belum memberikan keuntungan yang tinggi bagi petani	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait
	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis										
	Meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agrobisnis untuk ketersediaan pangan utama										
			Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Peredaran produk pertanian yang kurang aman pangan	327	Kepala Daerah	Kurang intensifnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan produk pertanian	Internal	C	kurang amannya produk pertanian	1. Pemerintah 2. OPD 3. Petani 4. Masyarakat
					327	Kepala Daerah	Belum meratanya jenis dan uji sampel keamanan pangan produk pertanian	Internal	C	kurang amannya produk pertanian	1. Pemerintah 2. OPD 3. Petani 4. Masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
				Menurunnya produksi tanaman pangan untuk memenuhi ketersediaan pangan karena semakin menurunnya luas lahan pertanian	327	Kepala Daerah	Beralihnya lahan pertanian menjadi perumahan karena tidak ditaatinya aturan tentang tata ruang	Internal	C	Produksi pangan menurun	1. Pemerintah 2. OPD 3. Petani 4. Masyarakat
				Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan Utama tidak seluruhnya untuk memenuhi ketersediaan Pangan Utama Daerah	327	Kepala Daerah	Menurunnya produktivitas lahan pertanian	Internal	C	Produksi pangan menurun	1. Pemerintah 2. OPD 3. Petani 4. Masyarakat
							Cadangan pangan pemerintah belum memadai	Internal	UC	Kebutuhan pangan utama tidak tercukupi secara mandiri oleh Pemerintah Daerah	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat
							Sarana prasarana untuk mendukung ketersediaan cadangan pangan belum dimanfaatkan secara optimal	Internal	C	Kebutuhan pangan utama tidak tercukupi secara mandiri oleh Pemerintah Daerah	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat
							Adanya hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan Utama yang dipasarkan keluar daerah	Internal	C	Ketersediaan Pangan dari produksi pertanian tanamanpangan utama berkurang	1. Pemerintah 2. OPD 3. Petani 4. Masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
	Perwujudan kawasan peruntukan industri dan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja										
	Meningkatnya investasi daerah										
			Nilai investasi daerah	Minat investor rendah	218	Kepala Daerah	Data produksi tidak valid	Internal	C	Menurunnya investor	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait
							Promosi potensi investasi belum optimal	Internal	C	Menurunnya investor	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait
				Lamanya proses perijinan yang mendukung investasi	218	Kepala Daerah	Lamanya pemberian rekomendasi teknis dari OPD terkait	Internal	C	Nilai investasi menurun	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait
	Meningkatnya kesempatan berusaha										
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	SDM tenaga kerja yang kurang berkualitas dan kesempatan kerja yang masih terbatas	207	Kepala Daerah	Kurang optimalnya pelatihan dalam peningkatan skill SDM tenaga kerja	Internal	C	Tenaga kerja menjadi kurang bisa bersaing di dunia kerja	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait
							Kesempatan kerja yang tersedia masih terbatas	Internal	C	Meningkatnya angka pengangguran	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait

No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dan memadai		Persentase Kinerja Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Menurunnya tingkat kemantapan jalan	103	Kepala Daerah	Ketergantungan terhadap anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan dan peningkatan jalan	Internal	C	Menurunnya kinerja pembangunan infrastruktur jalan	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait
							Kurang tepatnya metode dan waktu pelaksanaan pembangunan	Internal	C	Menurunnya kinerja pembangunan infrastruktur jalan	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait
				Menurunnya layanan irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	103	Kepala Daerah	Pemeliharaan jaringan kurang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat	Internal	C	Menurunnya produktivitas hasil petani	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait
							Penggunaan air irigasi untuk kebutuhan non pertanian	Internal	C	Tidak terpenuhinya kebutuhan air irigasi untuk pertanian	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait
							Kurangnya peran kelembagaan petani dalam pengelolaan irigasi	Internal	C	Terjadinya konflik penggunaan air irigasi	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait
				Adanya penduduk yang belum terlayani air minum layak	104	Kepala Daerah	Kurangnya ketersediaan sumber air baku	Eksternal	UC	Tidak terpenuhinya layanan dasar air minum	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait
							Belum tersedianya sistem penyediaan air minum di beberapa wilayah	Eksternal	UC	Bertambahnya beban masyarakat dalam penyediaan air minum	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait

No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
				Adanya penduduk yang belum terlayani infrastruktur air limbah	104	Kepala Daerah	Keterbatasan lahan untuk pembangunan infrastruktur air limbah	Internal	C	Tidak terpenuhinya layanan dasar air limbah	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait	
							Kesadaran masyarakat untuk pengelolaan air limbah yang benar	Eksternal	C	Pemanfaatan infrastruktur air limbah yang tersedia belum optimal	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait	
				Persentase Kinerja Infrastruktur Perhubungan	Kurang terkoneksi sistem transportasi	215	Kepala Daerah	Kurangnya terminal Tipe C	Internal	C	Kurangnya keamanan dan kenyamanan pelayanan transportasi	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait
								Belum terpenuhinya standar pelayanannya pada terminal yang ada	Internal	C	Kurangnya optimalnya pelayanannya transportasi	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3. OPD Terkait
	Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif											
	Meningkatnya Industri Pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal		Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata	Menurunnya jumlah kunjungan wisata	326	Kepala Daerah	Kurang menariknya destinasi wisata dan paket wisata yang tersedia	Internal	C	Target kunjungan wisata tidak tercapai	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait	
							Belum tersedianya paket wisata yang menghubungkan antar destinasi dan berorientasi aktivitas	Internal	C	Rata-rata lama tinggal wisatawan rendah	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait	

No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
			Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	Kurang berkembangnya pelaku ekonomi kreatif	326	Kepala Daerah	Kurangnya peran komunitas dalam pengembangan ekonomi kreatif	Internal	C	Pelaku ekonomi kreatif tidak berkembang	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait
							Kurangnya fasilitasi pemerintah terhadap pelaku ekonomi kreatif	Internal	C	pelaku ekonomi kreatif tidak berkembang	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait
							Belum adanya data yang update pelaku ekonomi kreatif yang akan difasilitasi untuk dikembangkan	Internal	C	Pelaku ekonomi kreatif tidak berkembang	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait
	Meningkatnya pertumbuhan pelaku ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro		Persentase Koperasi Sehat	Kurangnya kemampuan pengurus koperasi untuk mengelola koperasi menjadi sehat	217	Kepala Daerah	Kurangnya pembinaan terhadap koperasi	Eksternal	C	Koperasi tidak sehat	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait
			Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	Kurangnya daya saing usaha mikro	217	Kepala Daerah	Kurangnya peran pemerintah dalam memfasilitasi usaha mikro	Internal	C	Usaha mikro tidak berkembang	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait
							Kurangnya kompetensi SDM dalam mengembangkan usaha mikro	Internal	C	Usaha mikro tidak berkembang	1. Kepala Daerah 2.Masyarakat 3. OPD Terkait
							Kurangnya inovasi dan penerapan teknologi informasi dalam mengembangkan usaha mikro	Internal	C	Usaha mikro tidak berdaya saing	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3. OPD Terkait

No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
							Belum adanya data yang update pelaku usaha mikro yang akan difasilitasi untuk dikembangkan	Internal	C	Usaha mikro tidak berkembang	1.Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait
	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat										
	Meningkatnya kerukunan dan peran masyarakat dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram										
			Persentase kriminalitas yang tertangani	Meningkatnya kasus gangguan keamanan dan ketertiban	105	Kepala Daerah	Kurangnya pengawasan dan patroli rutin di beberapa lokasi yang rawan gangguan keamanan dan keteriban	Internal	C	Munculnya kasus gangguan keamanan dan ketertiban	1. Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait
							Kertebatasan personil lapangan yang menjaga keamanan dan ketertiban	Internal	C	Gangguan keamanan dan ketertiban tidak tertangani	1 Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD terkait
	Meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah										
			Persentase Pelestarian Budaya Banyumas	Masyarakat kurang minat dan tidak mengenal Budaya Banyumas	222	Kepala Daerah	Berkurangnya even yang menampilkan karya budaya dan kesenian Banyumas	Internal	C	Budaya Banyumas kurang lestari	1. Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait

No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
Meningkatnya peran dan daya saing pemuda			Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	Penurunan prestasi dan daya saing pelajar dan pemuda	219	Kepala Daerah	Kurangnya revitalisasi dan pelestarian karya budaya Banyumas	Internal	C	Budaya Banyumas dimungkinkan punah	1. Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait
							Menurunnya kejuaraan yang diikuti oleh pelajar dan pemuda	Internal	C	Menurunnya motivasi pelajar dan pemuda untuk meningkatkan kualitasnya	1. Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait
							Kurangnya fasilitasi pemerintah dalam bidang kepemudaan dan olahraga	Internal	C	Tidak berkembangnya potensi kepemudaan dan olahraga	1. Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait
							Berkurangnya pembinaan SDM kepemudaan dan olahraga yang berkualitas	Internal	C	Menurunnya kualitas SDM kepemudaan dan olahraga	1. Kepala Daerah 2.Masyarakat 3.OPD Terkait

4.3 ANALISIS RISIKO

Tahapan selanjutnya, hasil identifikasi risiko kemudian di analisis menggunakan kriteria penilaian risiko dengan menentukan nilai kemungkinan dan dampak. Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran form 4. Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan nilai tinggi. Berikut adalah daftar risiko prioritas dari hasil analisis risiko Pemerintah Kabupaten Banyumas :

Form 4

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2022
Tujuan Strategis	: Tujuan 1 Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik : Tujuan 2 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat : Tujuan 3 Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan : Tujuan 4 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian : Tujuan 5 Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis : Tujuan 6 Perwujudan kawasan peruntukan industri dan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja : Tujuan 7 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat : Tujuan 8 Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif : Tujuan 9 Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Kinerja Individu ASN belum selaras dengan tujuan OPD dan kurang mendukung pencapaian kinerja Pemkab sehingga nilai SAKIP pada komponen pengukuran kinerja individu tidak optimal	RSP.22	503	1	57	2.8	2.2	6.16
2	Kualitas evaluasi program belum mampu memperbaiki kualitas pelaksanaan maupun hasil program	RSP.22	501	1	54	3.0	2.2	6.6
3	Kurangnya respon dan komitmen organisasi dalam menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja	RSP.22	601	1	26	3.0	2.3	6.9
4	Pelaporan kinerja belum optimal menggambarkan capaian kinerja organisasi secara utuh	RSP.22	401	1	24	2.8	2.2	6.16
5	Penetapan target kinerja yang tidak tepat	RSP.22	501	1	54	3.0	2.3	6.9

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
		RSP.22	501	1	54			
6	Perumusan cascading dan indikator kinerja belum berpedoman pada proses bisnis organisasi	RSP.22	501	1	54	2.5	1.8	4.5
7	Belum optimal dan akuntabelnya pengelolaan aset daerah	RSP.22	502	1	56	3.6	2.4	8.64
8	Kelemahan pengelolaan belanja daerah yang tidak sesuai dengan perencanaan	RSP.22	502	1	56	3.5	2.1	7.35
9	Kelemahan pengelolaan pendapatan daerah karena rentang kendali luasnya wilayah Wajib Pajak	RSP.22	502	1	56	3.6	2.5	9
10	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	RSP.22	502	1	56	2.8	1.9	5.32
11	Penetapan klasifikasi anggaran belum sesuai ketentuan	RSP.22	502	1	56	3.2	2.1	6.72
12	Masih adanya kasus-kasus pungutan liar dan atau gratifikasi	RSP.22	601	1	26	3.3	2.3	7.59
13	Informasi mengenai produk, standar, prosedur layanan, pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengaduan belum tersampaikan secara sempurna kepada stakeholder	RSP.22	401	1	24	2.8	2.1	5.88
14	Pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dilaksanakan secara optimal	RSP.22	601	1	26	2.9	2.4	6.96
15	Rendahnya komitmen pimpinan dalam mengkondisikan lingkungan pengendalian di OPD	RSP.22	401	1	24	3.2	2.2	7.04
16	Risiko strategis yang tidak teridentifikasi dan teranalisis dengan baik	RSP.22	501	1	54	3.1	2.3	7.13
17	Aplikasi yang dibangun tidak memiliki payung hukum	RSP.22	216	1	17	3.0	2.0	6
18	Masih adanya sistem informasi yang dibangun belum terintegrasi dengan sistem informasi terkait lainnya	RSP.22	216	1	17	2.9	2.3	6.67

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
		RSP.22						
19	Data Statistik Sektoral belum dikelola dengan baik	RSP.22	216	1	17	2.8	2.5	7
20	Informasi Publik belum dikelola dengan baik oleh OPD	RSP.22	216	1	17	2.8	2.2	6.16
21	Pelayanan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan standar pelayanan	RSP.22	212	1	14	3.1	2.1	6.51
22	Penerbitan rekomendasi teknis melebihi waktu yang ditetapkan SOP	RSP.22	102	1	3	3.0	2.0	6
23	Terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh perangkat desa dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah desa	RSP.22	213	1	11	3.5	2.4	8.4
24	Adanya anak Tidak sekolah karena sama sekali tidak sekolah, Putus Sekolah dan tidak melanjutkan	RSP.22	101	1	2	3.4	2.5	8.5
25	Bekurangnya minat anak untuk membaca dan belajar	RSP.22	223	1	20	3.4	2.2	7.48
26	Kurangnya kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak	RSP.22	101	1	2	3.4	2.3	7.82
27	Kurang Optimalnya Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dalam memberikan pelayanan pendidikan	RSP.22	101	1	2	2.9	2.4	6.96
28	Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar kurang merata	RSP.22	101	1	2	3.4	2.6	8.84
29	Kurang meratanya sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama negeri	RSP.22	101	1	2	3.5	2.3	8.05
30	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap upaya kesehatan masyarakat dan perorangan	RSP.22	102	1	3	3.4	2.7	9.18
31	Masih ada masyarakat yang membuang limbah sembarangan	RSP.22	102	1	3	3.8	3.2	12.16
32	Pelayanan kesehatan ketika adanya pandemi penyakit belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat	RSP.22	102	1	3	3.5	2.4	8.4
33	Kegagalan program keluarga berencana	RSP.22	214	1	15	3.2	2.4	7.68

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
34	Masih kurangnya perempuan dalam mengakses, mengontrol, berpartisipasi dan memperoleh manfaat dalam pelayanan kesehatan, pendidikan dan ekonomi	RSP.22	208	1	15	3.6	2.5	9
35	Belum terpenuhinya penguatan kelembagaan dalam rangka pemenuhan hak anak	RSP.22	208	1	15	3.1	2.3	7.13
36	Tidak terpenuhinya Klaster Hak Anak	RSP.22	208	1	15	3.1	2.2	6.82
37	Bertambahnya pemukiman tidak layak huni	RSP.22	104	1	7	3.1	2.5	7.75
38	Belum semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terpenuhi kebutuhan dasarnya	RSP.22	106	1	11	3.4	2.6	8.84
39	Ketersediaan bantuan rumah layak huni bagi korban bencana belum tercukupi	RSP.22	104	1	7	3.3	2.6	8.58
40	Masih adanya korban bencana yang belum tertangani kebutuhan dasarnya	RSP.22	106	1	11	3.6	2.6	9.36
41	Masih kurangnya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	RSP.22	213	1	11	3.3	2.4	7.92
42	Kurangnya daya saing Industri kecil	RSP.22	331	1	23	3.0	2.5	7.5
43	Kurang berkembangnya sektor perdagangan	RSP.22	330	1	23	3.1	2.1	6.51
44	Hasil pertanian, peternakan dan perikanan kurang berdaya bersaing	RSP.22	209	1	22	3.1	2.8	8.68
45	Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan Utama tidak seluruhnya untuk memenuhi ketersediaan Pangan Utama Daerah	RSP.22	327	1	22	3.4	2.6	8.84
46	Menurunnya produksi tanaman pangan untuk memenuhi ketersediaan pangan karena semakin menurunnya luas lahan pertanian	RSP.22	327	1	22	3.7	3.0	11.1
47	Peredaran produk pertanian yang kurang aman pangan	RSP.22	327	1	22	3.3	2.5	8.25
48	Lamanya proses perijinan yang mendukung investasi	RSP.22	218	1	18	3.2	2.1	6.72
49	Minat investor rendah	RSP.22	218	1	18	3.3	2.4	7.92
50	SDM tenaga kerja yang kurang berkualitas dan kesempatan kerja yang masih terbatas	RSP.22	207	1	12	3.5	2.9	10.15

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
		RSP.22	211	1	13			
51	Adanya Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	RSP.22	211	1	13	3.8	2.9	11.02
52	Masih adanya sampah yang tidak tertangani serta timbulnya tempat pembuangan sampah liar	RSP.22	211	1	13	3.9	2.9	11.31
53	Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW	RSP.22	103	1	7	3.5	2.5	8.75
54	Bencana yang tidak tertanggulangi dengan baik	RSP.22	105	1	8	3.9	2.3	8.97
55	Adanya penduduk yang belum terlayani air minum layak	RSP.22	104	1	7	3.5	2.3	8.05
56	Adanya penduduk yang belum terlayani infrastruktur air limbah	RSP.22	104	1	7	3.4	2.5	8.5
57	Menurunnya layanan irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	RSP.22	103	1	6	3.3	2.2	7.26
58	Menurunnya tingkat kemantapan jalan	RSP.22	103	1	6	3.3	2.7	8.91
59	Kurang terkoneksinya sistem transportasi	RSP.22	215	1	16	3.3	2.3	7.59
60	Menurunnya jumlah kunjungan wisata	RSP.22	326	1	19	3.6	3.1	11.16
61	Kurang berkembangnya pelaku ekonomi kreatif	RSP.22	326	1	19	3.0	2.8	8.4
62	Kurangnya kemampuan pengurus koperasi untuk mengelola koperasi menjadi sehat	RSP.22	217	1	12	3.3	2.9	9.57
63	Kurangnya daya saing usaha mikro	RSP.22	217	1	12	3.2	2.7	8.64
64	Meningkatnya kasus gangguan keamanan dan ketertiban	RSP.22	105	1	10	3.8	2.4	9.12
65	Masyarakat kurang minat dan tidak mengenal Budaya Banyumas	RSP.22	222	1	19	2.7	2.8	7.56
66	Penurunan prestasi dan daya saing pelajar dan pemuda	RSP.22	219	1	19	3.1	2.3	7.13

DATA KORESPONDEN

R1. DINDIK

R2. DINKES

R3. RSUD BANYUMAS

R4. RSUD AJIBARANG

R5. DPU

R6. DINPERKIM

R7. BPBD

R8. KESBANGPOL

R9. SATPOL PP

R10. DINSOSPERMASDES

R11. DINAKERKOP UKM

R12. DLH

R13. DINDUKCAPIL

R14. DPPKBP3A

R15. DINHUB

R16. DINKOMINFO

R17. DPMPTSP

R18. DINPORABUDPAR

R19. DINARPUSDA

R20. DINKANNAK

R21. DINPERTAN KP

R22. DINPERINDAG

R23. SETDA

R24. SETWAN

R25. INSPEKTORAT

R26. BAPPEDA LITBANG

R27. BAPENDA

R28. BKAD

R29. BKPSDM

**FORMULIR KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO PRIORITAS**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2022
Tujuan Strategis	<ul style="list-style-type: none"> : Tujuan 1 Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik : Tujuan 2 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat : Tujuan 3 Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan : Tujuan 4 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian : Tujuan 5 Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis : Tujuan 6 Perwujudan kawasan peruntukan industri dan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja : Tujuan 7 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat : Tujuan 8 Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif : Tujuan 9 Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
		RSP.22	503	1	57				
1	Kinerja Individu ASN belum selaras dengan tujuan OPD dan kurang mendukung pencapaian kinerja Pemkab sehingga nilai SAKIP pada komponen pengukuran kinerja individu tidak optimal	RSP.22	503	1	57	6.16	BKPSDM	ASN belum memahami tujuan OPD	Nilai SAKIP pada komponen pengukuran kinerja tidak optimal
2	Kualitas evaluasi program belum mampu memperbaiki kualitas pelaksanaan maupun hasil program	RSP.22	501	1	54	6.6	BAPPEDA LITBANG	Metode evaluasi program belum tepat	Nilai SAKIP pada komponen evaluasi internal tidak optimal
3	Kurangnya respon dan komitmen organisasi dalam menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja	RSP.22	601	1	26	6.9	INSPEKTORAT	Belum tertib dan terkelola dengan baiknya pengarsipan dokumen pendukung	Kinerja kurang akuntabel karena dokumen pendukung tidak tersedia pada saat dibutuhkan
		RSP.22	601	1	26	6.9	INSPEKTORAT	Kurangnya pemahaman OPD mengenai tindak lanjut yang harus dilakukan	Nilai SAKIP pada komponen evaluasi internal tidak optimal

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
		RSP.22	601	1	26				
		RSP.22	601	1	26	6.9	INSPEKTORAT	Kurangnya koordinasi OPD dengan evaluator (APIP) terkait tindak lanjut evaluasi akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP pada komponen evaluasi internal tidak optimal
4	Pelaporan kinerja belum optimal menggambarkan capaian kinerja organisasi secara utuh	RSP.22	401	1	24	6.16	SETDA	SDM Penyusun laporan kurang memahami sepenuhnya ketentuan penyusunan laporan kinerja	Nilai SAKIP pada komponen pelaporan kinerja tidak optimal
5	Penetapan target kinerja yang tidak tepat	RSP.22	501	1	54	6.9	BAPPEDA LITBANG	Kurangnya koordinasi antara OPD dengan Tim Penyusun RPJMD	Nilai SAKIP pada komponen capaian kinerja tidak optimal
6	Perumusan cascading dan indikator kinerja belum berpedoman pada proses bisnis organisasi	RSP.22	501	1	54	4.5	BAPPEDA LITBANG	Belum optimalnya tingkat pemahaman OPD tentang peta proses bisnis	Target kinerja yang ditetapkan tidak tercapai optimal
		RSP.22	501	1	54	4.5	BAPPEDA LITBANG	Kurangnya kualitas SDM yang menangani perencanaan	Nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja tidak optimal
7	Belum optimal dan akuntabelnya pengelolaan aset daerah	RSP.22	502	1	56	8.64	BKAD	Kurangnya kompetensi dan jumlah SDM pengurus barang OPD	Tidak tercapainya status WTP terhadap laporan keuangan daerah
		RSP.22	502	1	56	8.64	BKAD	Keterbatasan anggaran untuk menginventarisir seluruh aset daerah	Tidak tercapainya status WTP terhadap laporan keuangan daerah
8	Kelemahan pengelolaan belanja daerah yang tidak sesuai dengan perencanaan	RSP.22	502	1	56	7.35	BKAD	Penegakan integritas sebagai salah satu pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal OPD belum optimal	tidak tercapainya status WTP terhadap laporan keuangan daerah
9	Kelemahan pengelolaan pendapatan daerah karena rentang kendali luasnya wilayah Wajib Pajak	RSP.22	502	1	56	9	BKAD	Otorisasi atas transaksi pendapatan belum dilaksanakan secara optimal	Tidak tercapainya status WTP terhadap laporan keuangan daerah
10	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	RSP.22	502	1	56	5.32	BKAD	Kurangnya SDM yang memiliki standar kompetensi jabatan penyusun laporan keuangan	tidak tercapainya status WTP terhadap laporan keuangan daerah
11	Penetapan klasifikasi anggaran belum sesuai ketentuan	RSP.22	502	1	56	6.72	BKAD	Kurang optimalnya verifikasi dan reviu rencana anggaran	Tidak tercapainya status WTP terhadap laporan keuangan daerah
12	Masih adanya kasus-kasus pungutan liar dan atau gratifikasi	RSP.22	601	1	26	7.59	INSPEKTORAT	Kurangnya integritas SDM pelaksana pelayanan	Tidak tercapainya nilai survey eksternal persepsi korupsi sesuai target

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
13	Informasi mengenai produk, standar, prosedur layanan, pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengaduan belum tersampaikan secara sempurna kepada stakeholder	RSP.22	401	1	24	5.88	SETDA	Kurangnya sosialisasi dan atau internalisasi mengenai produk, standar, prosedur layanan, pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengaduan	Informasi dan komunikasi tidak efektif
		RSP.22	401	1	24	5.88	SETDA	Kurangnya kepedulian tentang pentingnya informasi dan komunikasi dalam pencapaian tujuan	Informasi dan komunikasi tidak efektif
14	Pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dilaksanakan secara optimal	RSP.22	601	1	26	6.96	INSPEKTORAT	Kurangnya sarana dan prasarana Pemantauan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Kurang efektifnya pemantauan dan reviu atas pengendalian intern dan manajemen risiko
		RSP.22	601	1	26	6.96	INSPEKTORAT	Pemantauan masih dilaksanakan secara manual	Kurang efektifnya pemantauan dan reviu atas pengendalian intern dan manajemen risiko
15	Rendahnya komitmen pimpinan dalam mengkondisikan lingkungan pengendalian di OPD	RSP.22	401	1	24	7.04	SETDA	Kurangnya pemahaman pimpinan terhadap SPIP	Nilai SPIP unsur Lingkungan pengendalian rendah
16	Risiko strategis yang tidak teridentifikasi dan teranalisis dengan baik	RSP.22	501	1	54	7.13	BAPPEDA LITBANG	Kurangnya pemahaman OPD tentang risiko	Pencapaian tujuan terhambat
17	Aplikasi yang dibangun tidak memiliki payung hukum	RSP.22	216	1	17	6	DINKOMINFO	OPD yang membangun aplikasi tidak menyiapkan kebijakan formal terkait	Nilai SPBE dari aspek Kebijakan Tata Kelola rendah
18	Masih adanya sistem informasi yang dibangun belum terintegrasi dengan sistem informasi terkait lainnya	RSP.22	216	1	17	6.67	DINKOMINFO	Kurangnya anggaran untuk membangun sistem yang terintegrasi	Tidak tercapainya Nilai SPBE sesuai target
		RSP.22	216	1	17	6.67	DINKOMINFO	Kurangnya SDM di bidang IT	Tidak tercapainya Nilai SPBE sesuai target
19	Data Statistik Sektorial belum dikelola dengan baik	RSP.22	216	1	17	7	DINKOMINFO	Kurangnya SDM pengelola data statistik	Tidak tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik sesuai target
20	Informasi Publik belum dikelola dengan baik oleh OPD	RSP.22	216	1	17	6.16	DINKOMINFO	Kurang optimalnya peran PPID	Tidak tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik sesuai target
21	Pelayanan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan standar pelayanan	RSP.22	212	1	14	6.51	DINDUKCAPIL	SOP kurang berkualitas	Tidak tercapainya nilai persepsi terhadap kualitas pelayanan publik sesuai target

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
		RSP.22	212	1	14				
		RSP.22	212	1	14	6.51	DINDUKCAPIL	Keterbatasan anggaran, sarana prasarana dan SDM	Kepuasan Pengguna Layanan rendah
22	Penerbitan rekomendasi teknis melebihi waktu yang ditetapkan SOP	RSP.22	102	1	3	6	DINKES	Kurangnya tenaga ahli untuk melakukan survei/kajian pemberian rekomendasi teknis	Pelayanan pada masyarakat kurang optimal
23	Terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh perangkat desa dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah desa	RSP.22	213	1	11	8.4	DINSOSPERMASDES	SDM Pemerintahan Desa kurang kompeten Kebijakan dan prosedur yang tidak jelas	Tidak tercapainya nilai persepsi terhadap kualitas pelayanan publik sesuai target
24	Adanya anak Tidak sekolah karena sama sekali tidak sekolah, Putus Sekolah dan tidak melanjutkan	RSP.22	101	1	2	8.5	DINDIK	Biaya sekolah swasta tinggi dan transportasi mahal atau tidak terjangkau transportasi yang murah	Banyak anak putus sekolah
25	Bekurangnya minat anak untuk membaca dan belajar	RSP.22	223	1	20	7.82	DINARPUSDA	Kurang optimalnya fasilitas perpustakaan dengan memanfaatkan teknologi untuk mendukung minat baca dan belajar	Berkurangnya pengunjung perpustakaan
26	Kurangnya kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak	RSP.22	101	1	2	7.82	DINDIK	Tingkat pendidikan orang tua yang masih rendah	Rendahnya angka melanjutkan sekolah
27	Kurang Optimalnya Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dalam memberikan pelayanan pendidikan	RSP.22	101	1	2	6.96	DINDIK	Kurangnya Sosialisasi dan Belum Optimalnya Mutu Pendidikan Non Formal Program Kesetaraan Paket A dan Paket B	Berkurangnya nilai APM SD dan SMP
28	Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar kurang merata	RSP.22	101	1	2	8.84	DINDIK	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang kurang tepat	Ketersediaan Pendidik dan Tenaga pendidikan belum merata memenuhi kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan
		RSP.22	101	1	2	8.84	DINDIK	Kurangnya peningkatan kompetensi guru	Proses pembelajaran di sekolah formal maupun non formal belum optimal
		RSP.22	101	1	2	8.84	DINDIK	Kurangnya Guru yang berstatus sebagai PNS dan masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru Non ASN	Proses pembelajaran di sekolah formal maupun non formal belum optimal

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
		RSP.22	101	1	2				
		RSP.22	101	1	2	8.84	DINDIK	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang kurang tepat	Kuantitas dan Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang didistribusikan belum memenuhi kebutuhan sekolah
29	Kurang meratanya sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama negeri	RSP.22	101	1	2	8.05	DINDIK	Keterbatasan anggaran	Angka Harapan Lama Sekolah tidak tercapai
30	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap upaya kesehatan masyarakat dan perorangan	RSP.22	102	1	3	9.18	DINKES	Kurangnya efektifnya Sosialisasi kepada masyarakat terkait Pola Hidup Sehat	Banyaknya masyarakat di usia produktif yang menderita sakit kronis dan akut
31	Masih ada masyarakat yang membuang limbah sembarangan	RSP.22	102	1	3	12.16	DINKES	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengolahan limbah	Lingkungan tidak sehat
32	Pelayanan kesehatan ketika adanya pandemi penyakit belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat	RSP.22	102	1	3	8.4	DINKES	Belum optimalnya penanganan Angka Kematian Ibu (AKI) ketika adanya pandemi penyakit	Meningkatnya kematian ibu, bayi dan balita
		RSP.22	102	1	3	8.4	DINKES	Adanya bencana alam maupun non alam yang menyebabkan kematian	Meningkatnya kematian ibu, bayi dan balita
		RSP.22	102	1	3	8.4	DINKES	Kurangnya Jumlah Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan ketika adanya pandemi penyakit	Meningkatnya kematian ibu, bayi dan balita
33	Kegagalan program keluarga berencana	RSP.22	214	1	15	7.68	DPPKBP3A	Kurangnya sosialisasi dari Penyuluh KB	Laju pertumbuhan laju penduduk tidak terkendali
		RSP.22	214	1	15	7.68	DPPKBP3A	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya KB	Laju pertumbuhan laju penduduk tidak terkendali
34	Masih kurangnya perempuan dalam mengakses, mengontrol, berpartisipasi dan memperoleh manfaat dalam pelayanan kesehatan, pendidikan dan ekonomi	RSP.22	208	1	15	9	DPPKBP3A	Masih adanya persepsi masyarakat yang kurang terkait keterbatasan peran perempuan dalam pendidikan, kesehatan dan kegiatan ekonomi	Indek Pembangunan Gender tidak tercapai sesuai target

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
		RSP.22	208	1	15				
35	Belum terpenuhinya penguatan kelembagaan dalam rangka pemenuhan hak anak	RSP.22	208	1	15	7.13	DPPKBP3A	Kurangnya sumber daya manusia (SDM) terlatih Konvensi Hak Anak dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan	Nilai Kabupaten Layak Anak tidak tercapai sesuai target
		RSP.22	208	1	15	7.13	DPPKBP3A	Kurangnya anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	Nilai Kabupaten Layak Anak tidak tercapai sesuai target
36	Tidak terpenuhinya Klaster Hak Anak	RSP.22	208	1	15	6.82	DPPKBP3A	Tidak terpenuhinya hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus.	Nilai Kabupaten Layak Anak tidak tercapai sesuai target
37	Bertambahnya pemukiman tidak layak huni	RSP.22	104	1	7	7.75	DINPERKIM	Penduduk miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah layak huni	Penduduk miskin tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
38	Belum semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terpenuhi kebutuhan dasarnya	RSP.22	106	1	11	8.84	DINSOSPERMASDES	SDM yang melakukan pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) kurang cermat	Terdapat target PPKS yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya
39	Ketersediaan bantuan rumah layak huni bagi korban bencana belum tercukupi	RSP.22	104	1	7	8.58	DINPERKIM	Kurangnya ketersediaan anggaran bantuan rumah layak huni bagi korban bencana	Tidak terpenuhinya SPM Perumahan
40	Masih adanya korban bencana yang belum tertangani kebutuhan dasarnya	RSP.22	106	1	11	9.36	DINSOSPERMASDES	Pemutakhiran data tidak dilaksanakan	Penanganan korban bencana tidak tepat sasaran
		RSP.22	106	1	11	9.36	DINSOSPERMASDES	Kurangnya ketersediaan anggaran penanganan korban bencana	Target penangan korban bencana tidak tercapai
		RSP.22	106	1	11	9.36	DINSOSPERMASDES	SDM Pendata korban bencana kurang cermat	Penanganan korban bencana tidak tepat sasaran
41	Masih kurangnya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	RSP.22	213	1	11	7.92	DINSOSPERMASDES	kurangnya kapasitas SDM masyarakat dalam penanganan pencegahan bencana	Target penangan korban bencana tidak tercapai

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
		RSP.22							
42	Kurangnya daya saing Industri kecil	RSP.22	331	1	23	7.5	DINPERINDAG	Industri kecil belum memanfaatkan teknologi industri yang efisien	Harga produk industri kecil tidak bersaing karena biaya produksi tinggi
43	Kurang berkembangnya sektor perdagangan	RSP.22	330	1	23	6.51	DINPERINDAG	Tidak ada stimulus bagi industri perdagangan	Peningkatan jumlah usaha pada sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor tidak signifikan
44	Hasil pertanian, peternakan dan perikanan kurang berdaya bersaing	RSP.22	209	1	22	8.68	DINPERTAN KP	Masih tingginya biaya produksi sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan lokal	Peningkatan Pendapatan sektor sektor pertanian Kehutanan dan Perikanan tidak signifikan
		RSP.22	209	1	22	8.68	DINPERTAN KP	Masih kurangnya kompetensi SDM Pertanian dan Perikanan dalam meningkatkan daya saing produk Pertanian dan Perikanan	Hasil Produk Pertanian dan Perikanan belum memberikan keuntungan yang tinggi bagi petani
		RSP.22	209	1	22	8.68	DINPERTAN KP	Kurangnya penerapan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, peternakan dan perikanan	hasil pertanian, peternakan dan perikanan belum memberikan keuntungan yang tinggi bagi petani
45	Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan Utama tidak seluruhnya untuk memenuhi ketersediaan Pangan Utama Daerah	RSP.22	327	1	22	8.84	DINPERTAN KP	Cadangan pangan pemerintah belum memadai	Kebutuhan pangan utama tidak tercukupi secara mandiri oleh Pemerintah Daerah
		RSP.22	327	1	22	8.84	DINPERTAN KP	Adanya hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan Utama yang dipasarkan keluar daerah	Ketersediaan Pangan dari produksi pertanian tanamanpangan utama berkurang
		RSP.22	327	1	22	8.84	DINPERTAN KP	Sarana prasarana untuk mendukung ketersediaan cadangan pangan belum dimanfaatkan secara optimal	Kebutuhan pangan utama tidak tercukupi secara mandiri oleh Pemerintah Daerah
46	Menurunnya produksi tanaman pangan untuk memenuhi ketersediaan pangan karena semakin menurunnya luas lahan pertanian	RSP.22	327	1	22	11.1	DINPERTAN KP	Menurunnya produktivitas lahan pertanian	Produksi pangan menurun
		RSP.22	327	1	22	11.1	DINPERTAN KP	Beralihnya lahan pertanian menjadi perumahan karena tidak ditaatinya aturan tentang tata ruang	Produksi pangan menurun
47	Peredaran produk pertanian yang kurang aman pangan	RSP.22	327	1	22	8.25	DINPERTAN KP	Kurang intensifnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan produk pertanian	kurang amannya produk pertanian

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
		RSP.22							
		RSP.22	327	1	22	8.25	DINPERTAN KP	Belum meratanya jenis dan uji sampel keamanan pangan produk pertanian	kurang amannya produk pertanian
48	Lamanya proses perijinan yang mendukung investasi	RSP.22	218	1	18	6.72	DPMPTSP	Lamanya pemberian rekomendasi teknis dari OPD terkait	Nilai investasi menurun
49	Minat investor rendah	RSP.22	218	1	18	7.92	DPMPTSP	Promosi potensi investasi belum optimal	Menurunnya investor
		RSP.22	218	1	18	7.92	DPMPTSP	Data produksi tidak valid	Menurunnya investor
50	SDM tenaga kerja yang kurang berkualitas dan kesempatan kerja yang masih terbatas	RSP.22	207	1	12	10.15	DINAKERKOP UKM	Kesempatan kerja yang tersedia masih terbatas	Meningkatnya angka pengangguran
		RSP.22	207	1	12	10.15	DINAKERKOP UKM	Kurang optimalnya pelatihan dalam peningkatan skill SDM tenaga kerja	Tenaga kerja menjadi kurang bisa bersaing di dunia kerja
51	Adanya Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	RSP.22	211	1	13	11.02	DLH	Belum adanya petugas pengawas lingkungan hidup	Terjadinya pencemaran lingkungan
52	Masih adanya sampah yang tidak tertangani serta timbulnya tempat pembuangan sampah liar	RSP.22	211	1	13	11.31	DLH	Keterbatasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Terjadinya pencemaran akibat sampah
53	Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW	RSP.22	103	1	7	8.75	DINPERKIM	Keterbatasan RTRW sebagai perangkat perijinan	Rendahnya investasi daerah
54	Bencana yang tidak tertanggulangi dengan baik	RSP.22	105	1	8	8.97	BPBD	Kurangnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Kurangnya kesiapan daerah dalam penanggulangan bencana
55	Adanya penduduk yang belum terlayani air minum layak	RSP.22	104	1	7	8.05	DINPERKIM	Kurangnya ketersediaan sumber air baku	Tidak terpenuhinya layanan dasar air minum
		RSP.22	104	1	7	8.05	DINPERKIM	Belum tersedianya sistem penyediaan air minum di beberapa wilayah	Bertambahnya beban masyarakat dalam penyediaan air minum
56	Adanya penduduk yang belum terlayani infrastruktur air limbah	RSP.22	104	1	7	8.5	DINPERKIM	Kesadaran masyarakat untuk pengelolaan air limbah yang benar	Pemanfaatan infrastruktur air limbah yang tersedia belum optimal
		RSP.22	104	1	7	8.5	DINPERKIM	Keterbatasan lahan untuk pembangunan infrastruktur air limbah	Tidak terpenuhinya layanan dasar air limbah

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
57	Menurunnya layanan irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	RSP.22	103	1	6	7.26	DPU	Penggunaan air irigasi untuk kebutuhan non pertanian	Tidak terpenuhinya kebutuhan air irigasi untuk pertanian
		RSP.22	103	1	6	7.26	DPU	Pemeliharaan jaringan kurang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat	Menurunnya produktivitas hasil petani
		RSP.22	103	1	6	7.26	DPU	Kurangnya peran kelembagaan petani dalam pengelolaan irigasi	Terjadinya konflik penggunaan air irigasi
58	Menurunnya tingkat kemantapan jalan	RSP.22	103	1	6	8.91	DPU	Ketergantungan terhadap anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan dan peningkatan jalan	Menurunnya kinerja pembangunan infrastruktur jalan
		RSP.22	103	1	6	8.91	DPU	Kurang tepatnya metode dan waktu pelaksanaan pembangunan	Menurunnya kinerja pembangunan infrastruktur jalan
59	Kurang terkoneksi sistem transportasi	RSP.22	215	1	16	7.59	DINHUB	Belum terpenuhinya standar pelayanan pada terminal yang ada	Kurangnya optimalnya pelayanan transportasi
		RSP.22	215	1	16	7.59	DINHUB	Kurangnya terminal Tipe C	Kurangnya keamanan dan kenyamanan pelayanan transportasi
60	Menurunnya jumlah kunjungan wisata	RSP.22	326	1	19	11.16	DINPORABUDPAR	Kurang menariknya destinasi wisata dan paket wisata yang tersedia	Target kunjungan wisata tidak tercapai
		RSP.22	326	1	19	11.16	DINPORABUDPAR	Belum tersedianya paket wisata yang menghubungkan antar destinasi dan berorientasi aktivitas	Rata-rata lama tinggal wisatawan rendah
61	Kurang berkembangnya pelaku ekonomi kreatif	RSP.22	326	1	19	8.4	DINPORABUDPAR	Kurangnya peran komunitas dalam pengembangan ekonomi kreatif	Pelaku ekonomi kreatif tidak berkembang
		RSP.22	326	1	19	8.4	DINPORABUDPAR	Kurangnya fasilitasi pemerintah terhadap pelaku ekonomi kreatif	pelaku ekonomi kreatif tidak berkembang
		RSP.22	326	1	19	8.4	DINPORABUDPAR	Belum adanya data yang update pelaku ekonomi kreatif yang akan difasilitasi untuk dikembangkan	Pelaku ekonomi kreatif tidak berkembang
62	Kurangnya kemampuan pengurus koperasi untuk mengelola koperasi menjadi sehat	RSP.22	217	1	12	9.57	DINAKERKOP UKM	Kurangnya pembinaan terhadap koperasi	Koperasi tidak sehat

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
		RSP.22	217	1	12				
63	Kurangnya daya saing usaha mikro	RSP.22	217	1	12	8.64	DINAKERKOP UKM	Kurangnya kompetensi SDM dalam mengembangkan usaha mikro	Usaha mikro tidak berkembang
		RSP.22	217	1	12	8.64	DINAKERKOP UKM	Kurangnya peran pemerintah dalam memfasilitasi usaha mikro	Usaha mikro tidak berkembang
		RSP.22	217	1	12	8.64	DINAKERKOP UKM	Belum adanya data yang update pelaku usaha mikro yang akan difasilitasi untuk dikembangkan	Usaha mikro tidak berkembang
		RSP.22	217	1	12	8.64	DINAKERKOP UKM	Kurangnya inovasi dan penerapan teknologi informasi dalam mengembangkan usaha mikro	Usaha mikro tidak berdaya saing
64	Meningkatnya kasus gangguan keamanan dan ketertiban	RSP.22	105	1	10	9.12	SATPOL PP	Kurangnya pengawasan dan patroli rutin di beberapa lokasi yang rawan gangguan keamanan dan ketertiban	Munculnya kasus gangguan keamanan dan ketertiban
		RSP.22	105	1	10	9.12	SATPOL PP	Kertebatasan personil lapangan yang menjaga keamanan dan ketertiban	Gangguan keamanan dan ketertiban tidak tertangani
65	Masyarakat kurang minat dan tidak mengenal Budaya Banyumas	RSP.22	222	1	19	7.56	DINPORABUDPAR	Berkurangnya even yang menampilkan karya budaya dan kesenian Banyumas	Budaya Banyumas kurang lestari
		RSP.22	222	1	19	7.56	DINPORABUDPAR	Kurangnya revitalisasi dan pelestarian karya budaya Banyumas	Budaya Banyumas dimungkinkan punah
66	Penurunan prestasi dan daya saing pelajar dan pemuda	RSP.22	219	1	19	7.13	DINPORABUDPAR	Menurunnya kejuaraan yang diikuti oleh pelajar dan pemuda	Menurunnya motivasi pelajar dan pemuda untuk meningkatkan kualitasnya
		RSP.22	219	1	19	7.13	DINPORABUDPAR	Berkurangnya pembinaan SDM kepemudaan dan olahraga yang berkualitas	Menurunnya kualitas SDM kepemudaan dan olahraga
		RSP.22	219	1	19	7.13	DINPORABUDPAR	Kurangnya fasilitasi pemerintah dalam bidang kepemudaan dan olahraga	Tidak berkembangnya potensi kepemudaan dan olahraga

DATA KORESPONDEN

R1. DINDIK
R2. DINKES
R3. RSUD BANYUMAS
R4. RSUD AJIBARANG
R5. DPU
R6. DINPERKIM
R7. BPBD

R8. KESBANGPOL
R9. SATPOL PP
R10. DINSOSPERMASDES
R11. DINAKERKOP UKM
R12. DLH
R13. DINDUKCAPIL
R14. DPPKBP3A

R15. DINHUB
R16. DINKOMINFO
R17. DPMPTSP
R18. DINPORABUDPAR
R19. DINARPUSDA
R20. DINKANNAK
R21. DINPERTAN KP

R22. DINPERINDAG
R23. SETDA
R24. SETWAN
R25. INSPEKTORAT
R26. BAPPEDA LITBANG
R27. BAPENDA
R28. BKAD
R29. BKPSDM

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan pengendalian yang akan dibangun;
- b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- c. Membuat atau menyempurnakan pengendalian;
- d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- e. Menyempurnakan rancangan pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
- f. Menetapkan penerapan pengendalian.

2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua bentuk pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati.

FORMULIR KERTAS KERJA
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2022

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA						
1	Belum dilakukan pemetaan terhadap seluruh produk hukum yang telah dan akan terbit, sehingga dapat diidentifikasi peraturan yang tidak sinkron/harmonis dengan kebijakan lain dan memiliki potensi memperlambat proses pelayanan publik. Selanjutnya hasil identifikasi tersebut belum ditindaklanjuti dengan penyederhanaan atau deregulasi kebijakan.	Telah dilakukan pemetaan terhadap produk hukum yang telah dan akan terbit, sehingga dapat diidentifikasi peraturan yang tidak sinkron/harmonis dengan kebijakan lain dan memiliki potensi memperlambat proses pelayanan publik. Selanjutnya hasil identifikasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyederhanaan atau deregulasi kebijakan. Hasil inventarisasi : Terdapat 21 (dua puluh satu) Peraturan Daerah masuk dalam Propemperda tahun 2021. Terdapat 20 (dua puluh) Peraturan Daerah dan 6 (enam) Peraturan Bupati yang terdampak dengan diundangkannya UU Cipta Kerja sehingga harus dilakukan perubahan	KE	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Pemetaan terhadap seluruh produk hukum yang telah dan akan terbit ditindaklanjuti dengan penyederhanaan atau deregulasi kebijakan.	Bagian Hukum Setda	Triwulan 2

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
B	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF						
1	Peta proses bisnis belum sepenuhnya menggambarkan proses pencapaian kinerja pada setiap OPD, dan menjadi acuan dalam perumusan cascading kinerja utama pada setiap OPD sampai level individu, untuk memastikan bahwa setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas dalam pencapaian kinerja di masing-masing OPD	Perbup 36 th 2021 ttg perubahan perbup no 26 th 2020 ttg peta proses bisnis pemkab Banyumas	KE	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Melakukan evaluasi penyesuaian kinerja individu dan OPD terhadap cascading dan proses bisnis	Bagian Organisasi Setda dan Bappedalitbang	Triwulan 2
2	Sistem pengendalian internal dengan mengidentifikasi risiko kemungkinan kegagalan pencapaian target kinerja belum sepenuhnya diimplementasikan di seluruh OPD	Telah disusunnya RTP 2021 Tingkat OPD dan dilakukan Review RTP 2021 Tingkat OPD (OPD Sampel penilaian Baseline Maturitas SPIP)	KE	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Melaksanakan sosialisasi berkelanjutan untuk memberikan pemahaman pentingnya pengelolaan risiko dan RTP yang disusun kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja; internalisasi pengelolaan risiko untuk dapat diimplementasikan menjadi pertimbangan dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi;	Bappedalitbang	Triwulan I
3	Sistem pengendalian internal dengan mengidentifikasi risiko kemungkinan kegagalan pencapaian target kinerja belum sepenuhnya diimplementasikan di seluruh OPD	Disusunnya Perbup 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Risiko di Lingkungan pemkab Banyumas	KE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Komite Pengelolaan Risiko menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko, serta unit kepatuhan melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan risiko	Bappedalitbang selaku Koordinator Komite Pengelolaan Risiko, dan Asisten Setda	Triwulan 4

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
4	Indikator kinerja individu belum selaras dengan kinerja organisasi serta belum dijadikan acuan dalam penyusunan SKP.	Telah disusunnya SKP Juli-Desember 2021 yang sesuai dengan Permenpan 18 Tahun 2021.	KE	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap capaian Indikator Kinerja Individu sesuai kinerja organisasi berdasarkan SKP yang sesuai dengan Permenpan 18 Tahun 2021	BKPSDM	Triwulan 2
5	Masih kurangnya keterhubungan dan kesesuaian program dengan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dalam dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023	Dokumen Evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian program dengan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dalam dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023	Bappedalitbang	triwulan 4
6	Masih kurangnya keterhubungan dan kesesuaian program dengan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dalam dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023	Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi program dalam pencapaian tujuan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023	Bappedalitbang	triwulan 4
7	Peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif, dan dinamis belum optimal dan perlu disesuaikan dengan karakter layanan utama di masing-masing unit kerja.	Telah diterbitkan SK Agen Perubahan di setiap Perangkat Daerah.	KE	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Mensosialisasikan SK Agen Perubahan di setiap OPD dan mengoptimalkan Peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif, dan dinamis belum optimal dan perlu disesuaikan dengan karakter layanan utama di masing-masing unit kerja.	Semua OPD	triwulan 1

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
8	Peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif, dan dinamis belum optimal dan perlu disesuaikan dengan karakter layanan utama di masing-masing unit kerja.	Telah disusunnya Rencana Kerja agen perubahan Perangkat Daerah.	KE	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Mensosialisasikan Rencana Kerja agen perubahan Perangkat Daerah	semua OPD	triwulan 1
9	Peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif, dan dinamis belum optimal dan perlu disesuaikan dengan karakter layanan utama di masing-masing unit kerja.	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi atas Rencana Kerja Agen Perubahan agar dengan karakter layanan utama Perangkat Daerah.	KE	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Melakukan monitoring evaluasi dan pengendalian terhadap implementasi Rencana Kerja Agen Perubahan dan memberikan reward bagi agen perubahan yang berkinerja baik	semua OPD	triwulan 4
10	Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang mendorong setiap unit kerja mampu mengidentifikasi dan melakukan pengendalian risiko yang melekat pada upaya pencapaian kinerja, sebagai salah satu upaya optimalisasi pelaksanaan pengendalian internal	Telah disusunnya Perbub No. 64 Tahun 2010 tentang SPIP Kabupaten Banyumas, Perbup 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemkab Banyumas dan dibangunnya aplikasi MRI.	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan monev terhadap implementasi SPIP dan Pengelolaan Risiko	Bag Pembangunan Setda, Bappedalitbang dan Inspektorat	triwulan 3
11	Belum optimalnya Kebijakan pengawasan internal seperti penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, dan kebijakan benturan kepentingan.	Telah dibangunnya aplikasi Lapak Aduan Banyumas, Adanya UPG di masing-masing OPD, Telah dilakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (MCP)	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Dilakukan monev tindak lanjut Lapak aduan, UPG dan MCP	Inspektorat	Triwulan 3

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
C	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA						
1	Penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas belum disempurnakan dengan Grand Design pengembangan SPBE serta pengintegrasian sistem aplikasi baik dalam manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat/ stakeholder.	Telah dilakukan penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas : a)Layanan Bidang Perencanaan dan keuangan, telah dilakukan integrasi aplikasi dari SIPD, e-Budgeting , Jegos, e-Monev, e-SAKIP b)Layanan Bidang SDM (Simpatik Integrasi dengan e- SAKIP) c)Layanan Bidang Pengadaan (Sirup dengan Jegos) d)Layanan Bidang Pengawasan (WBS) e)Layanan Bidang Pelayanan Publik (Si Panjimas, Sim PKB, Mas Basid)	KE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Penyusunan Grand Design pengembangan SPBE serta pengintegrasian sistem aplikasi baik dalam manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat/ stakeholder.	Dinkominfo	triwulan 2
2	Penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas belum disempurnakan dengan Grand Design pengembangan SPBE serta pengintegrasian sistem aplikasi baik dalam manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat/ stakeholder.	Hasil evaluasi SPBE Kabupaten Banyumas Tahun 2020 dengan nilai 3,09 dengan predikat Baik.	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Perbaiki aspek indeks SPBE yang masih rendah	Dinkominfo, Bagian Organisasi Setda	triwulan 3
3	Pengelolaan sistem manajemen SDM belum menindaklanjuti pemanfaatan hasil assessment sebagai dasar pengembangan karier individu berbasis kompetensi, menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau HCDP secara menyeluruh dan memetakan talenta/ talent pool sebagai dasar penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan.	BKPSDM melakukan uji kompetensi bagi pegawai yang diusulkan kenaikan kelas jabatan dan promosi jabatan.	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memfaatkan hasil assessment sebagai dasar pengembangan karier individu berbasis kompetensi	BKPSDM	triwulan 4

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
4	Pengelolaan sistem manajemen SDM belum menindaklanjuti pemanfaatan hasil assessment sebagai dasar pengembangan karier individu berbasis kompetensi	Telah dilaksanakan seleksi terbuka untuk JPT dan Kepala Perangkat Daerah.	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan hasil assesment dalam Pelaksanaan seleksi terbuka untuk JPT dan Kepala Perangkat Daerah.	BKPSDM	triwulan 3
5	Pengelolaan sistem manajemen SDM belum menindaklanjuti pemanfaatan hasil assessment sebagai dasar menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau HCDP secara menyeluruh dan memetakan talenta/ talent pool sebagai dasar penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan.	Telah disusun Rekap rencana kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai.	KE	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Rekap rencana kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai digunakan sebagai dasar pengembangan kompetensi pegawai	BKPSDM	triwulan 1
6	Ukuran kinerja individu belum sepenuhnya berorientasi hasil sesuai dengan levelnya, dan belum ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja sampai dengan individu untuk dijadikan dasar dalam memberikan apresiasi/ penghargaan ataupun punishment bagi pegawai.	Dibangunnya aplikasi Simpatik Integrasi yang memuat Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, SKP, kontrak kerja bulanan dan catatan harian dari setiap pegawai yang mempengaruhi pemberian TPP	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan evaluasi pengendalian melalui aplikasi Simpatik Integrasi terhadap keselarasan kinerja pegawai dalam mendukung kinerja organisasi	BKPSDM	triwulan 1
7	Ukuran kinerja individu belum sepenuhnya berorientasi hasil sesuai dengan levelnya, dan belum ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja sampai dengan individu untuk dijadikan dasar dalam memberikan apresiasi/ penghargaan ataupun punishment bagi pegawai.	Telah dilakukan penyempurnaan (review) penjenjangan kinerja (Penyusunan PK berdasarkan hasil review Cascading) dalam aplikasi e SAKIP dan Simpatik terintegrasi.	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan evaluasi keselarasan kinerja pegawai sesuai dengan Indikator Kinerja Pegawai	BKPSDM	Triwulan 4

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
8	Ukuran kinerja individu belum sepenuhnya berorientasi hasil sesuai dengan levelnya, dan belum ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja sampai dengan individu untuk dijadikan dasar dalam memberikan apresiasi/ penghargaan ataupun punishment bagi pegawai;	Diundangkannya Perbup Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Evaluasi terhadap Implementasi Perbup No.6 Tahun 2021 dalam pemberian reward dan punishment sesuai kinerja pegawai	BKPSDM, bagian organisasi Setda	Triwulan 1,2,3,4
D	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF						
1	Belum optimalnya pembinaan dan fasilitasi terhadap Tim Counterpart untuk melakukan perbaikan secara mandiri (self improvement) atas kondisi permasalahan yang ada untuk peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP	Laporan Pelaksanaan Reviu atas Hasil Penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemkab Banyumas Tahun 2019, BPKP Perwakilan Jateng No. RR-1083/PW11/3.2/2019 tanggal 23 Desember 2019	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Reviu atas Hasil Penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemkab Banyumas	Inspektorat	Triwulan 2
2	Belum optimalnya administrasi seluruh dokumen pendukung infrastuktur SPIP secara tertib, baik data SPIP baseline, self assessment dan reviu	Tersusunnya Perbup No 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemkab Banyumas	KE	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Sosialisasi dan membangun komitmen pimpinan untuk tertib administrasi seluruh dokumen pendukung infrastuktur SPIP secara tertib, baik data SPIP baseline, self assessment dan reviu	masing-masing OPD yang terkait	triwulan 1
3	Belum optimalnya peran APIP sebagai Quality Assurance and Consulting yang bukan hanya berperan terhadap hal yang terkait dengan keuangan tetapi juga terhadap hal yang terkait dengan kinerja;	adanya Laporan hasil pendampingan penyusunan Rencana Tidak Pengendalian (RTP) tahun 2021 pada Perangkat Daerah	KE	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Laporan hasil pendampingan penyusunan Rencana Tidak Pengendalian (RTP) dilengkapi dengan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti	Inspektorat	Triwulan 2

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
4	Belum optimalnya peran APIP sebagai Quality Assurance and Consulting yang bukan hanya berperan terhadap hal yang terkait dengan keuangan tetapi juga terhadap hal yang terkait dengan kinerja;	Telah dibangunnya aplikasi Konsultasi Inspektorat	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Dilakukan monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil konsultasi	Inspektorat	triwulan 3
5	Belum optimalnya peran APIP sebagai Quality Assurance and Consulting yang bukan hanya berperan terhadap hal yang terkait dengan keuangan tetapi juga terhadap hal yang terkait dengan kinerja;	Pendampingan APIP dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan intensitas Pendampingan APIP dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah	Inspektorat	per semester

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan pengendalian yang sudah ada/sudah dilakukan

Kolom d diisi dengan penilaian efektifitas pengendalian yang ada:

- (1) E apabila Efektif;
- (2) KE apabila Kurang Efektif;
- (3) TE apabila Tidak Efektif.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

FORMULIR KERTAS KERJA
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas	
Tahun Penilaian	: 2022	
Tujuan Strategis	<ul style="list-style-type: none"> : Tujuan 1 : Tujuan 2 : Tujuan 3 : Tujuan 4 : Tujuan 5 : Tujuan 6 : Tujuan 7 : Tujuan 8 : Tujuan 9 	<ul style="list-style-type: none"> Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis Perwujudan kawasan peruntukan industri dan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat

No	Indikator Sasaran Bupati	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a		b	c	d	e	f	g	Dindik	i
1	Rata-rata Lama Sekolah	Adanya anak Tidak sekolah karena sama sekali tidak sekolah, Putus Sekolah dan tidak melanjutkan	RSP.22.101.01.02	Perbup terkait Wajar Dikdas, Keputusan Bupati tentang KBP Keputusan Bupati Banyumas No 900/763/Tahun 2021 tentang Penerimaan bantuan sosial siswa sekolah dasar melalui dinas pendidikan Kabupaten Banyumas	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengevaluasi implemtasi Peraturan Bupati tentang KBP	Bupati	Tahun 2022-2023
				Kebijakan Bupati dan Penyelenggaraan Program pendidikan yang memfasilitasi anak bersekolah ((SK Bupati Penyelenggaraan Sekolah Inklusi, Program Beasiswa, Program pendidikan kesetaraan, Sekolah Inklusi, dan PKBM di beberapa Kecamatan)	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengevaluasi implemtasi Peraturan Bupati tentang Inklusi	Bupati	Tahun 2022

No	Indikator Sasaran Bupati	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a		b	c	d	e	f	g	Dindik	i
2	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	Terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh perangkat desa dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah desa	RSP.22.213.01.11	Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banyumas	KE	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Kegiatan pendampingan dan pembinaan penyusunan APBDes	Bupati	Tahun 2022-2023
				Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banyumas	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monev penggunaan APBDes	Bupati	Tahun 2022-2023
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	SDM tenaga kerja yang kurang berkualitas dan kesempatan kerja yang masih terbatas	RSP.22.207.01.12	Rancangan Perbup Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Perbup Pengendalian dan perlindungan pekerja migran Indonesia	Bupati	Tahun 2023
				SK Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Banyumas	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Kerjasama lembaga Tripartit	Bupati	Tahun 2022-2023
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Adanya Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	RSP.22.211.01.13	"Perda No. 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda No. 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah "	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Bupati	Tahun 2022-2023

No	Indikator Sasaran Bupati	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a		b	c	d	e	f	g	Dindik	i
				Melaksanakan pemantauan lingkungan hidup	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monev tindak lanjut hasil pemantauan lingkungan hidup	Bupati	Tahun 2022-2023
5	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW	RSP.22.103.01.07	Mekanisme advice planning untuk pemrakarsa kegiatan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan yang cepat pertumbuhannya	Dinperkim	Tahun 2022-2023
				Dokumen RTRW dan RDTR Kawasan Perkotaan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan Dokumen Perubahan RTRW dan Penyusunan RDRTK Kawasan Perkotaan Prioritas	Bupati	Tahun 2022-2023
6	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata	Menurunnya jumlah kunjungan wisata	RSP.22.326.01.19	Pengembangan destiasi wisata, peningkatan promosi wisata serta Kemitraan dengan stakeholder pariwisata	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membangun jejaring pemasaran dan promosi pariwisata dengan stake holder pariwisata antara lain kerjasama paket-paket wisata	Bupati	Tahun 2022-2023
7	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	Kurang berkembangnya pelaku ekonomi kreatif	RSP.22.326.01.19	Inventarisasi pelaku ekonomi kreatif yang sudah berkembang	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pendataan potensi pelaku ekonomi kreatif	Bupati	Tahun 2022-2023

No	Indikator Sasaran Bupati	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a		b	c	d	e	f	g	Dindik	i
				Rakor pengembangan ekonomi kreatif	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membentuk forum ekonomi kreatif untuk bekerjasama mengembangkan ekonomi kreatif	Bupati	Tahun 2022-2023
				Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menyusun Perbup pembentukan forum ekonomi kreatif	Bupati	Tahun 2022-2023
8	Persentase Koperasi Sehat	Kurangnya kemampuan pengurus koperasi untuk mengelola koperasi menjadi sehat	RSP.22.217.01.12	Rancangan Perbup Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Banyumas	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Perbup Pengawasan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi	Bupati	Tahun 2022
				Inventarisasi kelas koperasi	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monev kondisi existing koperasi dan identifikasi permasalahannya	Bupati	Tahun 2022-2023
9	Persentase kriminalitas yang tertangani	Meningkatnya kasus gangguan keamanan dan ketertiban	RSP.22.105.01.10	Penegakan Perda No. 17 Th. 2015 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pelaksanaan penindakan pelanggaran perda dan atau perkara sesuai SOP yang berlaku serta penambahan jumlah PPNS pelaksana penindakan.	Bupati	Tahun 2022-2023

No	Indikator Sasaran Bupati	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a		b	c	d	e	f	g	Dindik	i
10	Persentase Kinerja Pengelolaan Sampah	Masih adanya sampah yang tidak tertangani serta timbulnya tempat pembuangan sampah liar	RSP.22.211.01.13	"1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, 2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Tugas Pembantuan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kepada Desa dalam Wilayah Kabupaten Banyumas"	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Koordinasi dan Monev pembentukan KSM oleh Desa implementasi Perbup 54 Tahun 2018	Bupati	Tahun 2022, 2023
11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Masih kurangnya perempuan dalam mengakses, mengontrol, berpartisipasi dan memperoleh manfaat dalam pelayanan kesehatan, pendidikan dan ekonomi	RSP.22.208.01.15	Melakukan kolaborasi, sinergi dan koordinasi antar OPD dalam meningkatkan komposit IPG	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Koordinasi lintas sektor mendorong program OPD untuk dapat meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan terhadap pembangunan melalui pembentukan vocal poin di setiap OPD	Bupati	Tahun 2022-2023
12	Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	Belum optimal dan akuntabelnya pengelolaan aset daerah	RSP.22.502.01.56	Pembuatan aplikasi pengelolaan aset daerah SIMBADA MAS	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pengembangan aplikasi pengelolaan aset daerah	Bupati	Tahun 2022-2023

No	Indikator Sasaran Bupati	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a		b	c	d	e	f	g	Dindik	i
				1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, 2. Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pendampingan dan Monev Pengelolaan aset daerah di OPD	Bupati	Tahun 2022-2023
13	Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	Kelemahan pengelolaan pendapatan daerah karena rentang kendali luasnya wilayah Wajib Pajak	RSP.22..01.55	Pelayanan Pembayaran secara on line	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Rencana Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)	Bapenda	Tahun 2022-2023
14	Usia Harapan Hidup (UHH)	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap upaya kesehatan masyarakat dan perorangan	RSP.22.102.01.03	Pelaksanaan Program Upaya kesehatan masyarakat dan Perorangan (Promosi kesehatan masyarakat, upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular, Proram percepatan penurunan stunting, AKI dan AKB	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat terhadap upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan	Bupati	Tahun 2022-2023
				Pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan di Faskes	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyediaan sarpras dan peningkatan kompetensi SDM untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Bupati	Tahun 2022-2023

No	Indikator Sasaran Bupati	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a		b	c	d	e	f	g	Dindik	i
15	Persentase Kinerja Pengelolaan Sampah	Masih ada masyarakat yang membuang limbah sembarangan	RSP.22.102.01.03	Sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan baik dan pemberian reward terhadap masyarakat yang mengelola sampah dengan baik (SALINMAS)	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan sosialisasi pengelolaan sampah oleh masyarakat	Bupati	Tahun 2022-2023
				Memfasilitasi pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menetapkan pedoman mengenai pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat	Bupati	Tahun 2022-2023
16	Persentase Lingkungan Permukiman yang layak huni	Bertambahnya pemukiman tidak layak huni	RSP.22.104.01.07	Perda Kabupaten Banyumas No. 12 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Bupati	Tahun 2022-2023
				Penyediaan dan perbaikan infrastruktur permukiman perkotaan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Konsolidasi lahan pada kawasan yang cepat tumbuh	Bupati	Tahun 2022-2023
17	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Belum semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terpenuhi kebutuhan dasarnya	RSP.22.106.01.11	SK Tim Penetapan lokasi rumah singgah	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Rencana Pembentukan UPTD Rumah Singgah	Bupati	Tahun 2022-2023

No	Indikator Sasaran Bupati	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a		b	c	d	e	f	g	Dindik	i
				SK Tim Penanganan PPKS Tingkat Kabupaten	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Rakor Tim Penanganan PPKS	Bupati	Tahun 2022, 2023
18	Persentase penanganan korban bencana	Ketersediaan bantuan rumah layak huni bagi korban bencana belum tercukupi	RSP.22.104.01.07	Inventarisasi data kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Validasi data dan verifikasi lapangan hasil inventarisasi data kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana	Bupati	Tahun 2022-2023
				Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pemenuhan rumah layak huni bagi semua korban bencana yang telah terdata	Bupati	Tahun 2022-2023
19	Persentase penanganan korban bencana	Masih adanya korban bencana yang belum tertangani kebutuhan dasarnya	RSP.22.106.01.11	Inventarisasi data kebutuhan dasar bagi korban bencana	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Validasi data dan verifikasi lapangan hasil inventarisasi data kebutuhan dasar bagi korban bencana	Bupati	Tahun 2023
				Pengadaan dapur umum untuk pemenuhan kebutuhan makanan bagi korban bencana	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua korban bencana yang telah terdata (sandang, pangan, layanan evakuasi dan psikososial)	Bupati	Tahun 2022

No	Indikator Sasaran Bupati	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a		b	c	d	e	f	g	Dindik	i
20	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Kurangnya daya saing Industri kecil	RSP.22.331.01.23	Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Koordinasi Lintas sektoral terhadap pelaksanaan RPIK	Bupati	Tahun 2022, 2023
21	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pertanian Kehutanan dan Perikanan	Hasil pertanian, peternakan dan perikanan kurang berdaya bersaing	RSP.22.209.01.22	SK Bupati Banyumas Nomor 518.9/978/tahun 2011 tentang penetapan program satu desa satu produk unggulan One Village One Product (OVOP)	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Koordinasi lintas sektoral dukungan kebijakan OVOP	Bupati	Tahun 2022-2023
22	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan Utama tidak seluruhnya untuk memenuhi ketersediaan Pangan Utama Daerah	RSP.22.327.01.22	Penyediaan lumbung padi masyarakat oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Surat Edaran Bupati Penumbuhan Lumbung Pangan di setiap desa untuk menjaga ketersediaan pangan	Bupati	Tahun 2022-2023
23	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Peredaran produk pertanian yang kurang aman pangan	RSP.22.327.01.22	Surat Edaran Bupati Nomor 520/2145 Tahun 2021 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Surat Edaran Bupati Pengawasan dan pembinaan keamanan produk pertanian sesuai aturan terbaru	Bupati	Tahun 2022-2023
24	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Menurunnya produksi tanaman pangan untuk memenuhi ketersediaan pangan karena semakin menurunnya luas lahan pertanian	RSP.22.327.01.22	Sosialisasi LP2B	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Peraturan Daerah LP2B	Bupati	Tahun 2022-2023

No	Indikator Sasaran Bupati	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a		b	c	d	e	f	g	Dindik	i
25	Persentase Kinerja Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Menurunnya tingkat kemantapan jalan	RSP.22.103.01.06	Peningkatan dan Pemeliharaan jalan kabupaten	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pendataan kondisi jalan dan meningkatkan anggaran pemeliharaan jalan kabupaten dengan mempertimbangkan prioritas dan kondisi jalan	Bupati	Tahun 2022-2023
26	Persentase Kinerja Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Adanya penduduk yang belum terlayani infrastruktur air limbah	RSP.22.104.01.07	Identifikasi usulan dari wilayah yang belum terlayani layanan sistem penyediaan air limbah	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pendataan penduduk yang belum terlayani infrastruktur air limbah	Bupati	Tahun 2022-2023
				Pengalokasian program layanan sistem penyediaan air limbah berdasarkan usulan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyediaan layanan infrastruktur air limbah bagi penduduk yang terdata belum mendapatkan layanan	Bupati	Tahun 2022-2023
27	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	Kurangnya daya saing usaha mikro	RSP.22.217.01.12	Rancangan Perbup Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kabupaten Banyumas	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Perbup Pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha	Bupati	Tahun 2022

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e diisi dengan penilaian efektivitas pengendalian yang ada:

- (1) E apabila Efektif;
- (2) KE apabila Kurang Efektif;
- (3) TE apabila Tidak Efektif.

Kolom f Diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom g diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom h diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom i diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah bentuk pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH, web Pemerintah Kabupaten Banyumas) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Rapat/koordinasi/konsultasi/bimtek

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran form 8.

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Mengevaluasi implemtasi Peraturan Bupati tentang KBP	Rapat koordinasi	Dindik	Satuan Pendidikan	Tahun 2022-2023	-	belum dilaksanakan
2	Mengevaluasi implemtasi Peraturan Bupati tentang Inklusi	Rapat, koordinasi, sosialisasi	Dindik	Satuan Pendidikan	Tahun 2022-2023	-	belum dilaksanakan
3	Kegiatan pendampingan dan pembinaan penyusunan APBDes	Rapat, koordinasi, konsultasi, desk	Dinsospermasdes	Desa	Tahun 2022-2023	-	belum dilaksanakan
4	Monev penggunaan APBDes	Rapat, koordinasi, konsultasi, desk	Kecamatan	Desa	Tahun 2022-2023	-	belum dilaksanakan
5	Perbup Pengendalian dan perlindungan pekerja migran Indonesia	Rapat koordinasi, sosialisasi	DinakerkopUKM	Bappedalitbang	Tahun 2022-2023	-	
5	Kerjasama lembaga Tripartit	Rapat koordinasi	Dinakerkop UKM	Bappedalitbang	Tahun 2022-2023	-	
	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Rapat koordinasi, konsultasi	Bidang Tata Lingkungan	DLH	Tahun 2022-2023	-	
6	Monev tindak lanjut hasil pemantauan lingkungan hidup	Rapat koordinasi, konsultasi	Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	DLH	Tahun 2022-2023	-	
7	Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan yang cepat pertumbuhannya	Rapat koordinasi, sosialisasi	Dinperkim	Masyarakat	Tahun 2022-2023	-	
8	Penyusunan Dokumen Perubahan RTRW dan Penyusunan RDRTK Kawasan Perkotaan Prioritas	Rapat koordinasi, konsultasi	Dinperkim	OPD, Masyarakat	Tahun 2022-2023	-	belum dilaksanakan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
9	Membangun jejaring pemasaran dan promosi pariwisata dengan stake holder pariwisata antara lain kerjasama paket-paket wisata	Rapat, koordinasi, konsultasi	Dinporabudpar	Stake holder pariwisata	Tahun 2022-2023	-	akan mulai dilaksanakan pada triwulan II
10	Pendataan potensi pelaku ekonomi kreatif	Rapat, koordinasi	Kecamatan	Dinporabudpar	Tahun 2022-2023	-	belum dilaksanakan
11	Membentuk forum ekonomi kreatif untuk bekerjasama mengembangkan ekonomi kreatif	Rapat, koordinasi	Komunitas ekonomi kreatif	Dinporabudpar	Tahun 2022-2023	-	belum dilaksanakan
12	Menyusun Perbup pembentukan forum ekonomi kreatif	Rapat, koordinasi, konsultasi, sosialisasi	Dinporabudpar	Masyarakat	Tahun 2022-2023	-	belum dilaksanakan
13	Perbup Pengawasan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi	Rapat, koordinasi, sosialisasi	DinakerkopUKM	Koperasi	Tahun 2022-2023	-	belum dilaksanakan
14	Monev kondisi existing koperasi dan identifikasi permasalahannya	Rapat, koordinasi	Koperasi	DinakerkopUKM	Tahun 2022-2023	-	belum dilaksanakan
15	Pelaksanaan penindakan pelanggaran perda dan atau perkara sesuai SOP yang berlaku serta penambahan jumlah PPNS pelaksana penindakan.	Rapat Koordinasi, Sosialisasi	Satpol PP	petugas penindakan pelanggaran perda dan/atau perkara, Masyarakat	Tahun 2022-2023	-	dilaksanakan tiap bulan
16	Koordinasi dan Monev pembentukan KSM oleh Desa implementasi Perbup 54 Tahun 2018	Rapat, koordinasi, konsultasi	DLH	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Masyarakat	Tahun 2022-2023	-	belum dilaksanakan
17	Koordinasi lintas sektor mendorong program OPD untuk dapat meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan terhadap pembangunan melalui pembentukan vocal poin di setiap OPD	Rapat koordinasi, bimtek, sosialisasi	DPPKBP3A	OPD, Organisasi Perempuan, Masyarakat	Tahun 2022-2023	-	belum dilaksanakan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
18	Pengembangan aplikasi pengelolaan aset daerah	Rapat koordinasi, desk	BKAD	OPD	Tahun 2022-2023	-	belum dilaksanakan
19	Pendampingan dan Monev Pengelolaan aset daerah di OPD	Rapat koordinasi, desk	BKAD	OPD	Tahun 2022-2023	-	belum dilaksanakan
20	Rencana Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)	Rapat, koordinasi, konsultasi	Bagian Organisasi Setda	Bapenda	Tahun 2022-2023		
21	Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat terhadap upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan	Rapat koordinasi, sosialisasi	Dinkes	Masyarakat	Tahun 2022-2023	-	belum dilaksanakan
22	Penyediaan sarpras dan peningkatan kompetensi SDM untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Rapat koordinasi, bimtek	Subag Umum Dinkes	Dinkes	Tahun 2022-2023	-	akan dilaksanakan mulai triwulan II
23	Meningkatkan sosialisasi pengelolaan sampah oleh masyarakat	Rapat koordinasi, sosialisasi	DLH	Masyarakat	Tahun 2022-2023	-	belum dilaksanakan
24	Menetapkan pedoman mengenai pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat	SE, rapat koordinasi, sosialisasi	DLH	Desa, kelurahan	Tahun 2022-2023	-	belum dilaksanakan
25	Penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Rapat koordinasi, sosialisasi	Dinperkim	OPD, Masyarakat	Tahun 2022-2023	-	belum dilaksanakan
26	Konsolidasi lahan pada kawasan yang cepat tumbuh	Rapat koordinasi, sosialisasi	Dinperkim	Masyarakat	Tahun 2022-2023	-	belum dilaksanakan
27	Rencana Pembentukan UPTD Rumah Singgah	Rapat koordinasi, sosialisasi	Dinsospermasdes	Masyarakat	Tahun 2022-2023	-	belum dilaksanakan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
28	Rakor Tim Penanganan PPKS	Rapat koordinasi, sosialisasi	Dinsospermasdes	Masyarakat	Tahun 2022-2023	-	belum dilaksanakan
29	Validasi data dan verifikasi lapangan hasil inventarisasi data kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana	Rapat, koordinasi	Dinperkim	Masyarakat	Tahun 2022-2023	-	belum dilaksanakan
30	Pemenuhan rumah layak huni bagi semua korban bencana yang telah terdata	Rapat, koordinasi, sosialisasi	Dinperkim	Masyarakat	Tahun 2022-2023	-	belum dilaksanakan
	Validasi data dan verifikasi lapangan hasil inventarisasi data kebutuhan dasar bagi korban bencana	Rapat, koordinasi	Dinsospermasdes	Masyarakat	Tahun 2022-2023	-	belum dilaksanakan
31	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua korban bencana yang telah terdata (sandang, pangan, layanan evakuasi dan psikososial)	Rapat, koordinasi	Dinsospermasdes	Masyarakat	Tahun 2022-2023	-	belum dilaksanakan
	Koordinasi Lintas sektoral terhadap pelaksanaan RPIK	Rapat, koordinasi	Dinperindag	Masyarakat	Tahun 2022-2023	-	belum dilaksanakan
32	Koordinasi lintas sektoral dukungan kebijakan OVOP	rakor, sosialisasi	KadinpertanKP	Desa, penyuluh, Kelompok tani	Tahun 2022-2023	-	akan dilaksanakan mulai triwulan II dan III
33	Surat Edaran Bupati Penumbuhan Lumbung Pangan di setiap desa untuk menjaga ketersediaan pangan	Rapat koordinasi, sosialisasi	Dinpertan KP	Masyarakat	Tahun 2022-2023	-	belum dilaksanakan
34	Surat Edaran Bupati Pengawasan dan pembinaan keamanan produk pertanian sesuai aturan terbaru	Rapat koordinasi, Sosialisasi	Dinpertan KP	Masyarakat	Tahun 2022-2023	-	belum dilaksanakan
35	Peraturan Daerah LP2B	Rapat koordinasi, sosialisasi	Dinpertan KP	Petani	Tahun 2022-2023	-	akan dilaksanakan mulai triwulan 2

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
36	Pendataan kondisi jalan dan meningkatkan anggaran pemeliharaan jalan kabupaten dengan mempertimbangkan prioritas dan kondisi jalan	Rapat koordinasi	Kecamatan	DPU	Tahun 2022-2023	-	belum dilaksanakan
37	Pendataan penduduk yang belum terlayani infrastruktur air limbah	Rapat koordinasi, konsultasi	Bidang Penyehatan Lingkungan	Dinperkim	Tahun 2022-2023	-belum dilaksanakan	
38	Penyediaan layanan infrastruktur air limbah bagi penduduk yang terdata belum mendapatkan layanan	Rapat koordinasi, sosialisasi	Dinperkim	Masyarakat	Tahun 2022-2023	-	belum dilaksanakan
39	Perbup Pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha	Rapat koordinasi	Pelaku usaha mikro	DinakerkopUKM	Tahun 2022-2023	-	belum dilaksanakan

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai bentuk pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi lampiran form 9.

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Mengevaluasi implemtasi Peraturan Bupati tentang KBP	Laporan evaluasi	Kepala Dindik	Tahun 2022-2023	-	
2	Mengevaluasi implemtasi Peraturan Bupati tentang Inklusi	Rakor dan laporan monev	Kepala Dindik	Tahun 2022-2023	-	
3	Kegiatan pendampingan dan pembinaan penyusunan APBDes	Rapat Koordinasi Monev APBDes	Kepala Dinsospermasdes	Tahun 2022-2023	-	
4	Monev penggunaan APBDes	Sosialisasi dan pendampingan penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes bagi Desa yang telah melaksanakan Pilkades	Kepala Dinsospermasdes	Tahun 2022-2023		Pendampingan penyusunan RPJMDes bagi Desa dengan Kepala Desa terpilih baru
5	Perbup Pengendalian dan perlindungan pekerja migran Indonesia	Monev implementasi kebijakan penciptaan lapangan kerja	Kepala DinakerkopUKM	Tahun 2022-2023	-	
5	Kerjasama lembaga Tripartit	Rakor evaluasi kerjasama lembaga tripartit	Kepala DinakerkopUKM	Tahun 2022-2023		
	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Rakor Monev ijin lingkungan hidup yang sudah diterbitkan	Kepala DLH	Tahun 2022-2023	-	
6	Monev tindak lanjut hasil pemantauan lingkungan hidup	Rakor Monev tindak lanjut hasil pemantauan lingkungan hidup	Kepala DLH	Tahun 2022-2023	-	
7	Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan yang cepat pertumbuhannya	Sosialisasi, rakor, inventarisasi, penetapan, pensertifikatan Penataan petak tanah dan peyediaan infastruktur jalan	Kepala Dinperkim	Tahun 2022-2023	-	

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
8	Penyusunan Dokumen Perubahan RTRW dan Penyusunan RDRTK Kawasan Perkotaan Prioritas	Rakor, FGD, Penyusunan Perubahan RTRW dan RDRTK Kawasan perkotaan prioritas oleh Tim	Kepala Dinperkim	Tahun 2022-2023	-	
9	Membangun jejaring pemasaran dan promosi pariwisata dengan stake holder pariwisata antara lain kerjasama paket-paket wisata	Sosialisasi dan rakor dengan stake holder pariwisata	Kepala Dinporabudpar	Tahun 2022-2023	-	
10	Pendataan potensi pelaku ekonomi kreatif	Laporan hasil Pendataan potensi pelaku ekonomi kreatif	Kepala Dinporabudpar	Tahun 2022-2023	-	
11	Membentuk forum ekonomi kreatif untuk bekerjasama mengembangkan ekonomi kreatif	Rakor forum ekonomi kreatif	Kepala Dinporabudpar	Tahun 2022-2023	-	
12	Menyusun Perbup pembentukan forum ekonomi kreatif	Laporan monev pelaksanaan kegiatan Forum ekonomi kreatif	Kepala Dinporabudpar	Tahun 2022-2023	-	
13	Perbup Pengawasan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi	Laporan Monev Pengawasan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi	Kepala DinakerkopUKM	Tahun 2022-2023	-	
14	Monev kondisi existing koperasi dan identifikasi permasalahannya	Rakor dan laporan hasil monev kondisi existing koperasi dan identifikasi permasalahannya	Kepala DinakerkopUKM	Tahun 2022-2023	-	
15	Pelaksanaan penindakan pelanggaran perda dan atau perkara sesuai SOP yang berlaku serta penambahan jumlah PPNS pelaksana penindakan.	Laporan kegiatan dan Monitoring kegiatan	Satpol PP	Tahun 2022-2023		
16	Koordinasi dan Monev pembentukan KSM oleh Desa implementasi Perbup 54 Tahun 2018	Laporan Kegiatan	Kepala DLH	Tahun 2022-2023	-	
17	Koordinasi lintas sektor mendorong program OPD untuk dapat meningkatkan akses,	Rakor Evaluasi RKA yang pro PPRG	Kepala DPPKBP3A	Tahun 2022-2023	-	

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
	partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan terhadap pembangunan melalui pembentukan vocal poin di setiap OPD					
18	Pengembangan aplikasi pengelolaan aset daerah	Rakor dan Sosialisasi Pengembangan aplikasi pengelolaan aset daerah	Kepala BKAD	Tahun 2022-2023	-	
19	Pendampingan dan Monev Pengelolaan aset daerah di OPD	Rakor Pendampingan dan Monev Pengelolaan aset daerah di OPD	Kepala BKAD	Tahun 2022-2023	-	
20	Rencana Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)	Rapat dan laporan monev	Kepala Bapenda	Tahun 2022-2023		
21	Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat terhadap upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan	Sosialisasi dan Laporan monev pembinaan Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat terhadap upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan	Kepala Dinkes	Tahun 2022-2023	-	
22	Penyediaan sarpras dan peningkatan kompetensi SDM untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Laporan hasil pelaksanaan pengadaan sarpras dan bimtek peningkatan kompetensi SDM untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Kepala Dinkes	Tahun 2022-2023	-	
23	Meningkatkan sosialisasi pengelolaan sampah oleh masyarakat	Laporan monev pengelolaan sampah dan pemberian penghargaan terhadap masyarakat yang mengelola sampah dengan baik	Kepala DLH	Tahun 2022-2023	-	
24	Menetapkan pedoman mengenai pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat	Rakor monev	Kepala DLH	Tahun 2022-2023	-	
25	Penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Laporan monev pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinperkim	Tahun 2022-2023		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
26	Konsolidasi lahan pada kawasan yang cepat tumbuh	Sosialisasi, rakor money hasil inventarisasi lahan	Kepala Dinperkim	Tahun 2022-2023	-	
27	Rencana Pembentukan UPTD Rumah Singgah	survey pemantauan dan rakor money hasil inventarisasi PPKS dari 13 PPKS	Kepala Dinsospermasdes	Tahun 2022-2023	-	
28	Rakor Tim Penanganan PPKS	Laporan hasil Pengadaan permukiman untuk PPKS	Kepala Dinsospermasdes	Tahun 2022-2023	-	
29	Validasi data dan verifikasi lapangan hasil inventarisasi data kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana	rakor dan survey hasil Validasi data dan verifikasi lapangan hasil inventarisasi data kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana	Kepala Dinperkim	Tahun 2022-2023	-	
30	Pemenuhan rumah layak huni bagi semua korban bencana yang telah terdata	Laporan hasil pembangunan RTLH bagi korban bencana	Kepala Dinperkim	Tahun 2022-2023		
	Validasi data dan verifikasi lapangan hasil inventarisasi data kebutuhan dasar bagi korban bencana	rakor dan laporan hasil survey Validasi data dan verifikasi lapangan hasil inventarisasi data kebutuhan dasar bagi korban bencana	Kepala Dinsospermasdes	Tahun 2022-2023	-	dilaksanakan apabila terjadi bencana
31	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua korban bencana yang telah terdata (sandang, pangan, layanan evakuasi dan psikososial)	Laporan kegiatan pengadaan dapur umum dan posko pelayanan korban bencana	Kepala Dinsospermasdes	Tahun 2022-2023	-	dilaksanakan apabila terjadi bencana
	Koordinasi Lintas sektoral terhadap pelaksanaan RPIK	Laporan hasil koordinasi	Kepala Dinperindag	Tahun 2022-2023	-	
32	Koordinasi lintas sektoral dukungan kebijakan OVOP	Laporan hasil kegiatan	Kepala Dipertan KP, Kepala Dinkannak	Tahun 2022-2023	-	

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
33	Surat Edaran Bupati Penumbuhan Lumbung Pangan di setiap desa untuk menjaga ketersediaan pangan	Laporan pemantauan pelaksanaan penyediaan Lumbung pemerintah	Kepala Dinpertan KP	Tahun 2022-2023	-	
34	Surat Edaran Bupati Pengawasan dan pembinaan keamanan produk pertanian sesuai aturan terbaru	Laporan pemantauan Pengawasan dan pembinaan keamanan produk pertanian	Kepala Dinpertan KP	Tahun 2022-2023	-	
35	Peraturan Daerah LP2B	Laporan pemantauan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinpertan KP	Tahun 2022-2023	-	
36	Pendataan kondisi jalan dan meningkatkan anggaran pemeliharaan jalan kabupaten dengan mempertimbangkan prioritas dan kondisi jalan	rakor, survey monev kondisi jalan	Kepala DPU	Tahun 2022-2023	-	
37	Pendataan penduduk yang belum terlayani infrastruktur air limbah	rakor, Laporan hasil survey Pendataan penduduk yang belum terlayani infrastruktur air limbah	Kepala Dinperkim	Tahun 2022-2023	-	
38	Penyediaan layanan infrastruktur air limbah bagi penduduk yang terdata belum mendapatkan layanan	Laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan jaringan air limbah bagi penduduk yang terdata belum mendapatkan layanan	Kepala Dinperkim	Tahun 2022-2023	-	
39	Perbup Pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha	rakor, laporan monev implementasi Perbup	Kepala DinakerkopUKM	Tahun 2022-2023	-	

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi lampiran form 10.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Pemerintah Kabupaten Banyumas merupakan bagian dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan bentuk pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun. Komitmen dari seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang professional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Purwokerto, 31 Maret 2022

